



Kabupaten Bangka Tengah



Satuan Polisi Pamong Praja

# LAPORAN KINERJA

## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Rivi u atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggung jawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civilsociety* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bangka Tengah, Januari 2025

KEPALA SATUANPOLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH



**Dr. Roy Haris Oktabian, S.STP, M.Si**  
Pembina Tk.I/ IV b  
NIP198210022002121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL..... iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

    A. Latar Belakang ..... 1

    B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja..... 1

    C. Isu Strategis Perangkat Daerah ..... 8

    D. Landasan Hukum ..... 12

    E. Sistematika ..... 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA ..... 14

    A. Rencana Strategis ..... 14

    B. Rencana Kinerja Tahun 2024..... 17

    C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 27

    A. Capaian Kinerja Organisasi..... 28

    B. Realisasi Anggaran ..... 45

    C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ..... 46

BAB IV PENUTUP ..... 56

LAMPIRAN ..... 65

    Matrik Renstra ..... 66

    Cascading Satpol PP Tahun 2024 ..... 78

    Pohon Kinerja Satpol PP Tahun 2024 ..... 82

    Perjanjian Kinerja Eselon Tahun 2024..... 83

    Perjanjian Kinerja Perubahan Eselon Tahun 2024..... 109

    SK TIM SAKIP Perangkat Daerah ..... 135

    Rencana Kerja Tahunan ..... 139

    Rencana Inovasi Tahun 2024 ..... 140

    Reward and Punishment Tahun 2024 ..... 141

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Aset per Tahun 2024..... 5

Tabel 1.2 Matrik Analisis Keterkaitan Antara Faktor Internal dan Eksternal ..... 9

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Satpol PP ..... 16

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Satpol PP ..... 17

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 Satpol PP ..... 21

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 ..... 22

Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Satpol PP Tahun 2024..... 22

Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Satpol PP Tahun 2024..... 24

Tabel 2.7 Perubahan Program dan Kegiatan Satpol PP Tahun 2024..... 24

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja..... 27

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satpol PP Tahun 2024..... 29

Tabel 3.3 Jumlah Responden SKM ..... 30

Tabel 3.4 Detail Nilai SKM Per Unsur ..... 30

Tabel 3.5 Penilaian Kriteria Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2023..... 31

Tabel 3.6 Data Gangguan Ketertiban dan Ketentraman umum pada Tahun 2024. 32

Tabel 3.7 Data Pelanggaran Perda/perkada pada Tahun 2024..... 33

Tabel 3.8 Kegiatan Peningkatan Operasi Damkar di WMK Tahun 2024 ..... 34

Tabel 3.9 Daftar Laporan Giat Evakuasi Penyelamatan tahun 2024 ..... 35

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja ..... 36

Tabel 3.11 Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 pada  
Terwujudnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik..... 36

Tabel 3.12 Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan 2023 pada Tingkat  
Penyelesaian K3 ..... 37

Tabel 3.13 Perbandingan Jumlah Pelanggaran K3 TA. 2024 dengan TA.2023 ..... 38

Tabel 3.14 Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan 2023 pada  
Persentase Penegakan Perda ..... 38

Tabel 3.15 Perbandingan Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada tahun 2024  
dengan Tahun 2023 ..... 39

Tabel 3.16 Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan 2023 pada Tingkat  
Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah  
Manajemen Kebakaran (WMK)..... 40

Tabel 3.17 Perbandingan Jumlah Penanggulangan Kebakaran pada TA. 2024  
di banding dengan TA. 2023..... 41

Tabel 3.18 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis..... 42

Tabel 3.19 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/  
Kabupaten/ Kota lain..... 42

Tabel 3.20 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi ..... 43

Tabel 3.21 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan ..... 44

Tabel 3.22 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan ..... 46

Tabel 3.23 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan  
Tahun 2024 ..... 46

Tabel 3.24 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan  
Kegiatan ..... 48

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebasdari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

### **B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA**

#### **1. Tupoksi**

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penegak Peraturan Daerah dan Pelayanan di bidang Penegakan Perda, Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah memiliki tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

**a. Tugas**

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Satpol PP dan sub kebakaran dan penyelamatan) yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

**b. Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

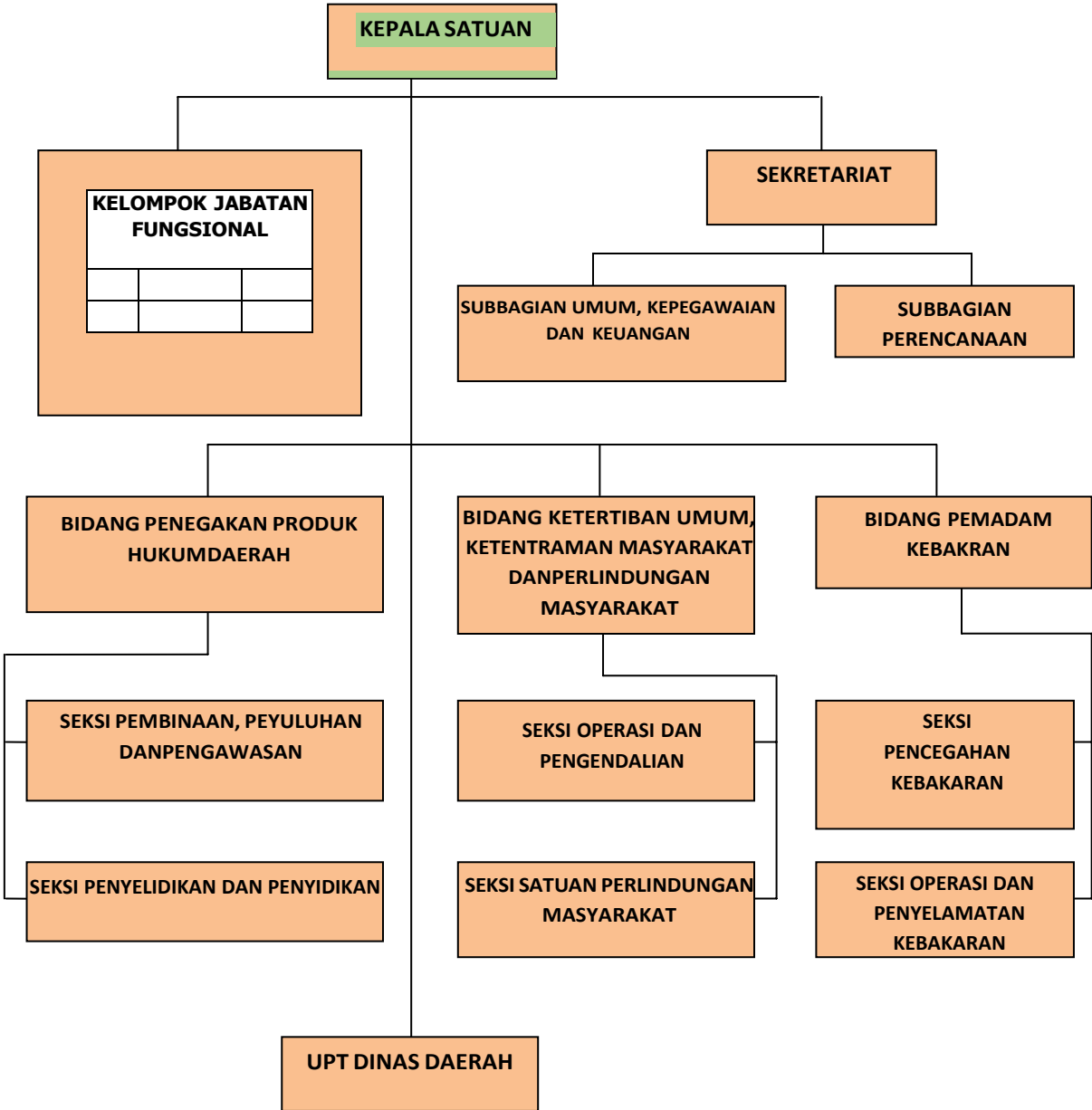
- a. Kepala Satuan ;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
- d. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Bidang Penanggulangan Bencana;
- f. Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan;
- g. Subbagian Perencanaan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**2. Struktur Organisasi**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Satuan sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

**Bagan Struktur Organisasi**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah**  
**dapat di gambarkan sebagai berikut :**



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah

**3. SDM Aparatur**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah mempunyai pegawai sebanyak 232 orang dengan susunan sebagai berikut :

**a. Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan dan Eselon ;**

No.	Jabatan	Eselon	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala SATPOL – PP	II b	1 Orang	-	1 Orang
2.	Sekretaris	III a	1 Orang	-	1 Orang
3.	Kepala Bidang	III b	3 Orang	-	3 Orang
4.	Kepala Seksi	IV a	5 Orang	1 Orang	6 Orang
5.	Kepala Subbag	IV a	-	2 Orang	2 Orang
6.	Staf/fungsional PNS	-	-	2 Orang	2 Orang
7.	Staff Honorer	-	1 Orang	4 Orang	5 Orang
8.	Supir Kasat	-	1 Orang	-	1 Orang



7.	Penjaga kebersihan kantor Non PNS	-	1 Orang	-	1 Orang
8.	Anggota SATPOL-PP PNS	-	12 Orang	2 Orang	14 Orang
9.	Anggota SATPOL-PP Honorer	-	136 Orang	18 Orang	154 Orang
10	Anggota DAMKAR PPPK	-	18 Orang	-	18 Orang
11.	Anggota Damkar- Honorer	-	21 Orang	3 Orang	24 Orang
<b>Jumlah</b>			<b>200 Orang</b>	<b>32 Orang</b>	<b>232 Orang</b>

**b. Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan :**

No.	Pendidikan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
	PNS			
1.	Strata 2 ( S-3 )	1 Orang	-	1 Orang
2.	Strata 1 ( S-1 )	9 Orang	3 Orang	12 Orang
3.	Sarjana Muda / DIII	1 Orang	3 Orang	4 Orang
4.	SLTA / Sederajat	11 Orang	1 Orang	12 Orang
	<b>Total PNS</b>	<b>22 Orang</b>	<b>7 Orang</b>	<b>29 Orang</b>
	PPPK			
1	SLTA / Sederajat	18 Orang	-	18 Orang
	<b>Total PPPK</b>	<b>18 Orang</b>	<b>-</b>	<b>18 Orang</b>
	NON PNS			
1.	Strata 2 ( S-2 )	-	-	-
2.	Strata 1 ( S-1 )	18 Orang	3 Orang	21 Orang
3.	Sarjana Muda / DIII	5 Orang	-	5 Orang
4.	Serjana Muda / DII	2 Orang	-	2 Orang
5.	SLTA / Sederajat	135 Orang	22 Orang	157 Orang
	<b>Total NON PNS</b>	<b>160 Orang</b>	<b>25 Orang</b>	<b>185 Orang</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>200 Orang</b>	<b>32 Orang</b>	<b>232 Orang</b>

**c. Jumlah pegawai berdasarkan golongan :**

No	Golongan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
	PNS			
1.	IV	4 Orang	-	4 Orang
2.	III	13 Orang	5 Orang	18 Orang
3.	II	5 Orang	2 Orang	7 Orang
	<b>Total PNS</b>	<b>22 Orang</b>	<b>7 Orang</b>	<b>29 Orang</b>
	PPPK			
1.	II	18 Orang	-	18 Orang
	<b>Total PPPK</b>	<b>18 Orang</b>	<b>-</b>	<b>18 Orang</b>
	NON PNS			
1.	IV	-	-	-
2.	III	23 Orang	3 Orang	26 Orang
3.	II	135 Orang	22 Orang	157 Orang
4.	I	2 Orang	-	2 Orang
	<b>Total Non PNS</b>	<b>160 Orang</b>	<b>25 Orang</b>	<b>185 Orang</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>200 Orang</b>	<b>32 Orang</b>	<b>232 Orang</b>

**4. Aset**

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Aset per Tahun 2024

No. urut	Nama/Jenis Barang	Tahun Perolehan	Satuan	Barang	Total Harga (Rupiah)
I	TANAH				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2004	m2	5.632	13,125,000.00
II	PERALATAN DAN MESIN				
2	Station Wagon	2008	unit	1	229,000,000.00
3	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	2015	unit	1	196,375,000.00
4	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	2019	unit	1	262,995,000.00
5	Truck + Attachment	2006	unit	1	214,500,000.00
6	Pick Up	2005	unit	1	127,000,000.00
7	Pick Up	2011	unit	1	314,200,000.00
8	Pick Up	2015	unit	1	160,150,000.00
9	Sepeda Motor	2007-2018	unit	14	350,001,050.00
10	Mobil Pemadam Kebakaran	2007	unit	1	1,346,950,000.00
11	Mobil Pemadam Kebakaran	2009	unit	1	1,664,509,560.00
12	Mobil Pemadam Kebakaran (Water Suplay Hino)	2023	unit	1	1,285,000,000.00
13	Gerobak Dorong	2019	unit	1	550,000.00
14	Peralatan Las Karbit	2012	unit	1	6,250,000.00
15	Dongkrak Hidrolik	2013	unit	2	9,500,000.00
16	Global Positioning System	2015	unit	1	4,350,000.00
17	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2007	unit	1	2,000,000.00
18	Lemari Besi/Metal	2010-2014	unit	8	22,209,056.00
19	Lemari Besi	2014	unit	10	19,455,170.00
20	Lemari Kaca	2014 & 2023	unit	7	23,453,102.00
21	Lemari Makan	2010	unit	2	5,064,017.00
22	Filing Cabinet Besi	2005-2012	unit	11	22,640,000.00
23	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	2013	unit	1	7,700,000.00
24	White Board	2014	unit	4	3,760,000.00
25	Mesin Absensi	2019	unit	1	5,000,000.00
26	Hand Metal Detector	2006	unit	2	9,000,000.00
27	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2023	unit	1	950,000.00
28	LCD Projector/Infocus	2013 & 2023	unit	2	34,550,000.00
29	Papan Nama Instansi	2006	unit	1	3,000,000.00
30	Teralis	2006	unit	17	23,980,000.00
31	Papan Billboard	2018	unit	7	49,900,000.00
32	Kursi Besi/Metal	2014	unit	4	6,000,000.00
33	Meja Rapat	2019	unit	1	16,556,450.00
34	Meja 1/2 Biro	2013-2019	unit	24	32,938,700.00
35	Tempat Tidur Kayu	2010	unit	2	7,647,000.00
36	Kasur/Spring Bed	2013	unit	2	5,880,000.00
37	Meja Makan Kayu	2007 & 2017	unit	2	9,658,205.00
38	Kursi Rapat	2019	unit	50	26,822,800.00
39	Kursi Tamu	2010		2	10,000,000.00
40	Kursi Putar	2006 & 2016	unit	4	5,544,000.00
41	Kursi Biasa (untuk Staf)	2016	unit	6	4,758,000.00
42	Meja Komputer	2010	unit	2	1,000,000.00
43	Sofa	2006	unit	4	3,030,900.00
44	Meja Biro (untuk Eselon IV)	2016	unit	2	3,596,000.00

No. urut	Nama/Jenis Barang	Tahun Perolehan	Satuan	Barang	Total Harga (Rupiah)
45	Meja Biro	2019	unit	5	15,032,250.00
46	Lemari Rias	2017	unit	2	4,976,410.00
47	Rak Kayu	2016 & 2023	unit	7	12,240,000.00
48	Tenda	2007	unit	2	26,400,000.00
49	Mesin Pemotong Rumput	2010	unit	2	6,000,000.00
50	Mesin Cuci	2017	unit	1	4,743,750.00
51	A.C. Split	2006	unit	1	6,200,000.00
52	Kipas Angin	2014 & 2016	unit	10	7,896,000.00
53	AC unit	2016	unit	1	21,850,000.00
54	Kompore Gas (Alat Dapur)	2007 & 2014	unit	3	2,240,000.00
55	Televisi	2013	unit	2	8,700,000.00
56	Wireless	2012	unit	1	21,300,000.00
57	Megaphone	2012	unit	2	4,870,000.00
58	Tiang Bendera	2006	unit	2	2,990,000.00
59	Dispenser	2014	unit	2	4,375,000.00
60	Gordyn/Kray	2012	unit	2	10,045,600.00
61	Valbed	2015	unit	20	12,900,000.00
62	Generator Set/Genset	2012	unit	1	13,400,000.00
63	Tameng	2006- 2012	unit	32	25,200,000.00
64	Rompi	2006	unit	40	37,800,000.00
65	Helm	2006	unit	20	11,000,000.00
66	Pompa Kebakaran/Portable	2014	unit	1	150,922,143.00
67	Pakaian Panas/Lengkap	2012 & 2020	unit	13	42,500,000.00
68	Topeng (masker) Oksigen (Alat Pernapasan)	2018	unit	2	31,518,608.00
69	Topeng (masker) Oksigen	2018	unit	8	20,000,000.00
70	Alat Pembantu Kebakaran	2012 & 2014	unit	37	86,952,558.00
71	APAR 6 Kg (Alat Pembantu Kebakaran)	2018	unit	6	7,200,000.00
72	Lampu Senter	2012	unit	2	1,080,000.00
73	Selang	2012	unit	16	47,200,000.00
74	Sepatu	2012-2020	unit	57	66,340,000.00
75	Tombak	2012	unit	1	600,000.00
76	Helm Damkar	2012	unit	27	43,055,174.00
77	Kapak Damkar	2018	unit	3	9,614,368.00
78	Sarung Tangan Tahan Api	2018	unit	2	1,300,000.00
79	Meja Resepsionis	2023	unit	1	15,600,000.00
80	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2023	unit	1	7,910,000.00
81	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2013 & 2023	unit	5	20,025,000.00
82	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2023	unit	1	4,990,000.00
83	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2013 & 2023	unit	5	16,375,000.00
84	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2013	unit	4	7,400,000.00
85	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2005	unit	2	1,697,500.00
86	Pesawat Telephone	2014 & 2019	unit	5	16,435,360.00
87	Handy Talky (HT)	2012-2018	unit	31	78,100,000.00
88	Antena Hustler HT	2006	unit	1	5,750,000.00
89	Unit Tranceiver FM	2012	unit	1	3,600,000.00
90	Termometer Gun	2020	unit	1	1,700,000.00
91	Bak Fiber Glass	2011	unit	2	4,709,182.00
92	Internet	2013	unit	2	1,390,000.00
93	P.C Unit	2012	unit	9	100,000,600.00

No. urut	Nama/Jenis Barang	Tahun Perolehan	Satuan	Barang	Total Harga (Rupiah)
94	Lap Top	2012	unit	2	28,900,000.00
95	Lap Top	2016 & 2023	unit	4	47,241,900.00
96	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2016	unit	1	4,000,000.00
97	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018 & 2023	unit	10	29,549,900.00
98	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2023	unit	1	12,500,000.00
99	Alat Selam Seet	2020	unit	1	29,675,000.00
100	Pakaian Penyelamatan (Jumpsuit Rescue)	2020	unit	5	7,500,000.00
101	Helm Penyelamatan (Rescue Helm)	2020	unit	5	7,500,000.00
<b>III</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>				
102	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2006	M2	148	287,855,000.00
103	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2010	M2	111	232,151,800.00
104	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung PPNS)	2022	M2	42	199,202,000.00
105	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2008	M2	20	38,000,000.00
106	Gedung Pos Jaga Permanen	2014	M2	42	150,527,000.00
107	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen (Sekretariat Damkar)	2008	M2	240	476,324,455.00
108	Gedung Garasi/Pool Permanen	2012	M2	60	115,079,000.00
109	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	2007	M2	24	29,950,000.00
110	Rumah Penjaga	2007	M2	35	54,825,000.00
111	Asrama Permanen	2015	M2	300	1,183,113,000.00
<b>IV</b>	<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>				
112	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	2011	M1	2	5,944,634.00
113	Sumur Bor	2007	M2	1	12,450,000.00
114	Sumur Bor	2013	M2	1	49,998,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>Rp. 10.113.649.264</b>

Satuan Polisi Pamong Praja masih membutuhkan banyak sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran anggota SATPOL - PP dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya.

Adapun sarana dan prasarana yang masih diperlukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

1. Mobil Patroli
2. Mobil angkut barang sita (Truk)
3. Mobil Pemadam Kebakaran
4. Air Soft Gun
5. Kendaraan Pengenalan Masa (Dalmas)

### **C. ISU STRATEGIS PRANGKAT DAERAH**

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai mana tertuang pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja periode 2021-2026 sebagai berikut :

#### **1. Hambatan/Permasalahan**

Berdasarkan fakta yang ada, permasalahan yang selama ini masih sering menjadi kendala bagi satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain:

- a. Kasus pelanggaran terhadap Peraturan Daerah semakin meningkat;
- b. Pengetahuan dan ketrampilan anggota Satpol PP dan anggota Linmas yang masih perlu ditingkatkan;
- c. Diklat Ketrampilan Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang mendapatkan perhatian;
- d. Motivasi kerja dan penguasaan bidang tugas masih rendah;
- e. Kurangnya dukungan lembaga social lainnya dalam upaya pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. Sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kerja masih terbatas
- g. Peralatan penanggulangan bencana masih minim.

#### **2. Tantangan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi kendala sebagai berikut :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat pada pelaksanaan Perda
- b. Adanya stigma negatif yang muncul dari masyarakat terhadap aparat Sat Pol PP dari dampak perkembangan media sosial

#### **3. Peluang**

Adapun peluang yang ada diantaranya :

- a. Perkembangan Produk Hukum Peraturan Daerah bertambah.
- b. Adanya tuntutan dari masyarakat untuk peningkatan ketertibaan ketentraman umum.
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat, anggota linmas dan Satpol PP dalam menciptakan ketentraman keteriban umum dan penegakan perda.

Berdasarkan isu – isu yang berkembang di masyarakat dan pengamatan terhadap lingkungan strategis, dapat diidentifikasi kondisi internal ( kekuatan dan

kelemahan ) dan eksternal ( peluang dan tantangan ).

Identifikasi keempat aspek positif dan negatif organisasi tersebut akan membantu pemerintah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menentukan tujuan, sasaran, dan strategi dan kebijakan yang akan diambil dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Analisis lingkungan internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah memperhatikan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan dan analisis lingkungan eksternal memperhatikan unsur-unsur peluang dan tantangan sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Matrik Analisis Keterkaitan Antara Faktor Internal dan Eksternal**

	KEKUATAN ( S )	KELEMAHAN ( W )
	1. Kuatnya dasar hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah;	1. Belum optimalnya pembudayaan dan pembinaan disiplin dan loyalitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Anggota Linmas;
	2. Adanya sistem pembagian kerja yang baik dan manajemen operasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan lapangan ;	2. kurang berkualitasnya SDM, banyaknya anggota Satpol PP dan anggota LINMAS yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan PPNS, Diklat Intelijen Satpol PP dan diklat LINMAS;
	3. Cepat tanggapnya sikap Polisi Pamong Praja dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat	3. Sarana dan prasarana kegiatan yang belum memenuhi syarat baik dari segi mutuaupun jumlah;
	4. Tidak adanya kesenjangan sosial antara pemimpin dan staf maupun anggota Polisi Pamong Praja	4. Masih kurangnya komunikasi yang efektif antara Satpol PP dengan masyarakat;
	5. Adanya komitmen aparatur untuk melaksanakan tugas dengan baik	5. Adanya kekosongan jabatan dalam struktur organisasi, kurangnya anggota SATPOLPP dan kurangnya PPNS;
		6. Terbatasnya dana operasional dan pemberian reward yang kurang memadai.
		7. Peralatan penanggulangan bencana masih minim
PELUANG ( O )	STRATEGI ( S - O )	STRATEGI ( W - O )
1. Adanya Kebijakan Pemerintah Daerah dan Kebijakan nasional dalam mendukung tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja;	1. Meningkatkan profesionalisme Aparat Polisi Pamong Praja guna mendukung tugas-tugas teknis administratif, teknis yuridis dan teknis operasional	1. Mengadakan sosialisasi PERDA maupun Kepala Daerah terhadap masyarakat secara intens dan berkala,
2. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat serta semangat reformasi;	2. Mengembangkan Program kerja sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat	2. Meningkatkan kualitas SDM Polisi Pamong Praja dan anggota LINMAS melalui pembinaan, pendidikan maupun Bimbingan teknis lainnya
3. Semakin demokratisnya kehidupan masyarakat;	3. Melakukan konsultasi kegiatan secara lebih intens dengan unsur pimpinan dalam mengoperasionalkan kegiatan	3. Merekrut staff baru yang berkompeten untuk mengisi kekosongan jabatan
4. Terjalannya hubungan dengan kepolisian, TNI, LSM, Perguruan Tinggi, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta komponen masyarakat lainnya;	4. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat, aparat tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dalam menciptakan suasana tertib, tentram, damai dan tegaknya supremasi perda serta tanggap terhadap terjadinya bencana.	4. Pengadaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program kerja,
5. Tingginya kesadaran sikap dan komitmen masyarakat dalam mendukung penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;		5. Mengusulkan tambahan anggaran biaya operasional,
6. Besarnya keinginan masyarakat untuk hidup rukun, tertib, tentram, aman, dan damai.		
7. Indeks Resiko Bencana yang relatif rendah		
TANTANGAN ( T )	STRATEGI ( S - T )	STRATEGI ( W - T )
1. Berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin pesat mendorong percepatan perubahan sosial ekonomi ( Pengaruh negatif dari globalisasi ) ;	1. Memberi pemahaman terhadap warga masyarakat dan membantu mencari solusi dalam penanggulangan tambang inkonvensional ilegal dan penyakit masyarakat ( PEKAT) seperti miras, prostitusi dan perjudian	1. Peningkatan kualitas & profesionalitas aparat Polisi Pamong Praja dan LINMAS melalui Pendidikan & pelatihan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat & menekan terjadinya pelanggaran PERDA,
2. Adanya tuntutan yang semakin meningkat terhadap kinerja Satpol PP di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan PERDA;	2. Meningkatkan pelaksanaan operasional untuk mengembalikan fungsi peraturan Daerah maupun keputusan Kepala Daerah	2. Peran serta masyarakat dalam menunjang kinerja SATPOL PP
3. Image negatif masyarakat terhadap Polisi Pamong Praja dan memandang rendah terhadap tugas LINMAS;	3. Meningkatkan sosialisasi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparat Penegak PERDA dan tugas anggota LINMAS,	3. Meningkatkan Koordinasi, pendataan dan evaluasi untuk mendapatkan data tentang pelanggaran PERDA
4. Kurangnya dukungan lembaga sosial politik local dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan keamanan;	4. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga dan instansi pemerintah dan non pemerintah sampai ke tingkat ke bawah.	4. Mengadakan penambahan jumlah personil Polisi Pamong Praja, TIM Reaksi Cepat dan Tim Pemadam Kebakaran hingga mencapai jumlah memadai terhadap cakupan wilayah,

5. Masih lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam pelaksanaan tupoksi;	5. Meningkatkan jalinan koordinasi aparat di tingkat lapangan	5. meningkatkan operasi-operasi penertiban.
6. Luasnya cakupan wilayah		
7. Perekonomian masyarakat yang lemah sehingga tingginya angka pengangguran		
8. Masyarakat tidak puas dengan dengan hasil PILKADA/kebijakan Pemerintah		
9. Tingkat kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana masih rendah (Disaster awareness);	6. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi situasi bencana.	

Dari analisis di atas, Sejumlah isu – isu strategis prioritas yang perlu mendapat perhatian ekstra untuk saat ini dan tahun-tahun yang akan datang terkait Peran Kepala PD yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah dalam menghadapi Tantangan dan Peluang dan beban pekerjaan di 5 (lima) tahun mendatang adalah :

**1. Analisa Kekuatan (Strength)**

Kekuatan Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

- a. Kuatnya dasar hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten BangkaTengah;
- b. Adanya sistem pembagian kerja yang baik dan manajemen operasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan lapangan ;
- c. Cepat tanggapnya sikap Polisi Pamong Praja dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat
- d. Tidak adanya kesenjangan sosial antara pemimpin dan staf maupun anggota PolisiPamong Praja
- e. Adanya komitmen aparaturnya untuk melaksanakan tugas dengan baik

**2. Analisa Kelemahan (Weakness) Tantangan**

Kelemahan (Weakness) Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

- a. Belum optimalnya pemberdayaan dan pembinaan disiplin dan loyalitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Anggota Linmas;
- b. kurang berkualitasnya SDM, banyaknya anggota Satpol PP dan anggota LINMAS yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan PPNS, Diklat Intelijen Satpol PP dan diklat LINMAS;
- c. Sarana dan prasarana kegiatan yang belum memenuhi syarat baik dari segi mutumaupun jumlah;
- d. Masih kurangnya komunikasi yang efektif antara Satpol PP dengan masyarakat;
- e. kurangnya anggota SATPOL PP dan kurangnya PPNS;
- f. Terbatasnya dana operasional dan pemberian reward yang kurang memadai.

**3. Analisa Ancaman Satuan Polisi Pamong Praja Meliputi :**

Kesadaran masyarakat terrhadap Peraturan Dearah/Keputusan Kepala Daerah masih belum menyeluruh.

**4. Analisa Peluang (Opportunities)**

Peluang (Opportunities) Satuan Polisi Pamong Praja adalah

- a. Adanya Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendukung tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat
- c. Sinergisitas kepolisian, TNI, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta komponen
- d. Tingginya kesadaran sikap dan komitmen masyarakat dalam mendukung penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Besarnya keinginan masyarakat untuk hidup rukun, tertib, tentram, aman, dandamai.

## 5. Analisa Ancaman (Threat)

Peluang Ancaman (Threat) Satuan Polisi Pamong Praja adalah

- a. Kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah masih kurang;
- b. Pertumbuhan ekonomi cukup tinggi mengakibatkan pendatang dari daerah cukup tinggi dan memberikan usaha bagi pendatang (pedagang kaki lima dan lainnya) Berdasarkan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Satuan Polisi

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024.

Adapun Strategi Kepala PD yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah dalam menetapkan Faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. **Strategi S + O** (mengoptimalkan Kekuatan untuk memanfaatkan Peluang) yaitu:
  - Meningkatkan profesionalisme Aparat Polisi Pamong Praja guna mendukung tugas-tugas teknis administratif, teknis yuridis dan teknis operasional;
  - Mengembangkan Program kerja sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat;
  - Meningkatkan keikutsertaan masyarakat, aparat tingkat kecamatan dan desa/ kelurahan dalam menciptakan suasana tertib, tentram, damai dan tegaknya supremasi perda serta tanggap terhadap terjadinya kebakaran (respon Time Rate).
2. **Strategi S + T** (menggunakan Kekuatan untuk mencegah dan mengatasi Ancaman) yaitu:
  - Memberi pemahaman terhadap warga masyarakat dan membantu mencari solusi dalam penanggulangan tambang inkonvensional ilegal dan penyakit masyarakat (PEKAT) seperti miras, prostitusi dan perjudian;



- Meningkatkan pelaksanaan operasional untuk mengembalikan fungsi peraturan Daerah maupun keputusan Kepala Daerah;
- Meningkatkan sosialisasi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparat Penegak PERDA dan tugas anggota LINMAS;
- Meningkatkan koordinasi dengan lembaga dan instansi pemerintah dan non pemerintah sampai ke tingkat ke bawah;
- Meningkatkan jalinan koordinasi lintas sektoral bersama aparat di tingkat lapangan.

**3. Strategi W + O** (mengurangi Kelemahan untuk memanfaatkan Peluang) yaitu:

- Mengadakan sosialisasi dan Pembinaan PERDA terhadap masyarakat secara intens dan berkala;
- Meningkatkan kualitas SDM Polisi Pamong Praja dan anggota LINMAS melalui pembinaan, pendidikan maupun Bimbingan teknis lainnya ;
- Pengadaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program kerja;
- Mengusulkan tambahan anggaran biaya operasional.

**4. Strategi W + T** (mengurangi Kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman) yaitu:

- Peningkatan kualitas & profesionalitas aparat Polisi Pamong Praja dan LINMAS melalui Pendidikan & pelatihan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat & menekan terjadinya pelanggaran PERDA;
- Peran serta masyarakat dalam menunjang kinerja SATPOL PP;
- Meningkatkan Koordinasi, pendataan dan evaluasi untuk mendapatkan data tentang pelanggar PERDA;
- Mengadakan penambahan jumlah personil Polisi Pamong Praja, TIM Reaksi Cepat dan Tim Pemadam Kebakaran hingga mencapai jumlah memadai terhadap cakupan wilayah;
- Meningkatkan operasi-operasi penertiban.

## **D. LANDASAN HUKUM**

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
5. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

## **E. SISTEMATIKA**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 adalah :

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>
	Meliputi penutup beserta lampiran-lampiran

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

##### 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Bangka Tengah dengan potensi, keragaman dan kompleksitas Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024. Visi pembangunan Kabupaten Bangka Tengah yang ingin dicapai adalah: **“Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah Yang Semakin Unggul”**.

Maksud visi di atas adalah :

Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah Yang Semakin Unggul. Makna yang terkandung dari visi tersebut adalah Kabupaten Bangka Tengah memiliki keunggulan yang lebih di berbagai sektor pembangunan seperti sumber daya manusia yang unggul, ekonomi yang unggul, sarana prasarana yang unggul, lingkungan yang unggul dan layanan pemerintahan yang unggul. Unggul disini berarti memiliki kemampuan, dan/atau kekuatan, berdasarkan potensi yang ada untuk bersaing, memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Semakin unggul berarti berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Bangka Tengah. Melalui Sumber Daya yang semakin unggul, tangguh dan berkualitas akan berdampak positif terhadap peningkatan daya saing, kemandirian daerah, dan juga dalam mendukung pembangunan nasional.

Penjelasan terhadap penjabaran visi tersebut adalah merupakan rumusan dari berbagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan berlangsung sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Hal tersebut tidak lain dalam rangka untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera dengan menerima manfaat sebesar-besarnya dari pelaksanaan kegiatan pembangunan.

## **2. Misi**

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berkualitas Berdasarkan Iman dan Taqwa;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Yang Unggul dan Berkelanjutan Melalui Penguasaan dan Pengembangan IPTEK;
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik Yang Unggul dan Merata;
4. Mewujudkan Lingkungan Yang Unggul Serta Berkelanjutan;
5. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Unggul.

Perumusan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah mengacu pada Misi ke-5, yaitu : **“Meningkatkan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Unggul”**

## **3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja**

### **a. Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 sebanyak 3 tujuan dan 4 sasaran strategis.

c. Indikator Kinerja

Inidikator Kinerja adalah nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator Kinerja juga mendefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai tujuannya.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenBangka Tengah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai Mutu Kepuasan pelayanan	79 %	79 %	79 %	79 %	80 %	80 %
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB	BB	BB
			Kinerja Laporan Keuangan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2.	Terwujudnya ketertiban dan Keamanan yang kondusif	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya penegakan perda	Persentase Penegakan PERDA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Terwujudnya Penanggulangan Kebakaran yang handal dan efektif	Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilaya Manajemen Kebakaran(WMK)	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %

Sumber : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Periode 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan indikator kinerja utama ( IKU ) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja serta RPJMD 2021-2026. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator – indikator kinerja yang ada dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026 yang memiliki fokus pada stockholder dan peningkatan kapasitas internal organisasi ( internal bussines process ).

Indikator kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah yang akan digunakan untuk periode 2021 – 2026 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah**

	Tujuan/ Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penanggung jawab	Sumber Data	Formulasi/Rumus Perhitungan
1.	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	Kasatpol PP	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	<div>Jumlah Pelanggaran K3 tahun yang terselesaikan ----- X 100% Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP</div>
		Persentase Penegakan Perda/perkada	%	Kasatpol PP	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	<div>Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda/Perkada ----- X 100% Jumlah Pelanggaran Perda / Perkada</div>
2.	Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	Kasatpol PP	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	<div>Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu max 15 menit ----- X 100% Jumlah Kasus Kebakaran dalam jangkauan WMK</div>
3.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai Mutu Kepuasan Masyarakat	Nilai	Kasatpol PP	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Hasil survei kepuasan pelayanan ASN yang dilaksanakan tahun berjalan
		Nilai SAKIP OPD	Nilai			Hasil penilaian LKIP yang dilaksanakan Inspektorat Daerah KabupatenBangka Tengah
		Kinerja Laporan Keuangan	Sesuai			Hasil Review Laporan Keuangan sesuai dengan Standar AkuntansiPemerintahan

Sumber Data : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

**B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024**

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya (Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya). Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Berikut Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 :

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kinerja Tahun 2024**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bangka Tengah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terwujudnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai Mutu Kepuasan Masyarakat	Nilai	89
			Nilai SAKIP OPD	BB	71
			Kinerja Laporan Keuangan	SESUAI	SESUAI
2.	Terwujudnya ketertiban dan Keamanan yang kondusif	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	Persen	100
		Meningkatnya penegakan perda	Persentase Penegakan PERDA	Persen	100
3.	Terwujudnya Penanggulangan Kebakaran yang handal dan efektif	Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilaya Manajemen Kebakaran(WMK)	Persen	85

Sumber :Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenBangka Tengah tahun 2024

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tengah Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 - 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 02 bulan Januari tahun 2024 ditetapkan

Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024**

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai Mutu Kepuasan masyarakat	89
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	71 (BB)
			Kinerja Laporan Keuangan	SESUAI
2.	Terwujudnya ketertiban dan Keamanan yang kondusif	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,Kententraman dan Keindahan)	100 %
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %
3.	Terwujudnya Penanggulangan Kebakaran yang handal dan efektif	Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Rate Time) wilayah Kebakaran	85%
1.		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 6.099.194.000,-
2.		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		Rp. 4.985.456.000,-
3.		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		Rp. 938.868.000,-
		Jumlah Anggaran Tahun 2024		Rp. 12,171,518,000,-

Sumber : Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah :

**Tabel 2.5**  
**Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024**

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran Awal (DPA 2024)
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik		Nilai SAKIP OPD	Nilai	71 (BB)	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Pelayanan OPD Sesuai Tupoksinya	Nilai	89	Rp 6,318,410,000
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan baik dan tepat waktu	Kategori Nilai	100%	Rp 20,000,000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP	SAP	100%	Rp 5,267,000,000



No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran Awal (DPA 2024)
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persen	100%	Rp 10,000,000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100%	Rp 25,000,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Persen	100%	Rp 149,200,000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persen	100%	Rp 241,080,000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100%	Rp 606,130,000
	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat		Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3	Persen	100%	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100%	Rp 4,893,968,000
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100%	Rp 225,000,000
	Meningkatnya penegakan perda		Persentase Penegakan PERDA	Persen	100%	
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	Persen	100%	Rp 4,643,968,000
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	Persen	100%	Rp 25,000,000
	Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif		Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100%	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kab/Kota	Persen	100%	Rp 959,140,000
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kab/Kota	Persen	100%	Rp 904,140,000
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Pengendalian Kebakaran	Persen	100%	Rp 15,000,000
		Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase pengendalian kebakaran	Persen	100	Rp 15,000,000
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pengendalian kebakaran	Persen	100%	Rp 25,000,000
TOTAL						Rp 12,171,518,000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Tahun 2024

Program dan kegiatan pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024 yaitu 3 Program dan 14 kegiatan serta anggaran sebesar Rp. 12,171,518,000,- (*Dua belas miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah*).

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 14 bulan Oktober tahun 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); (point 2) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024**

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai Mutu Kepuasan masyarakat	89
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	71 (BB)
			Kinerja Laporan Keuangan	SESUAI
2.	Terwujudnya ketertiban dan Keamanan yang kondusif	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,Kententraman dan Keindahan)	100 %
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %
3.	Terwujudnya Penanggulangan Kebakaran yang handal dan efektif	Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Rate Time) wilayah Kebakaran	85%
1.		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 6.099.194.000,-
2.		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		Rp. 4.985.456.000,-
3.		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		Rp. 938.868.000,-
		Jumlah Perubahn Anggaran Tahun 2024		Rp. 12.023.518.000,-

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.7**  
**Perubahan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024**

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Perubahan Anggaran (DPPA 2024)
1	2	3	4	5	6	8
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik		Nilai SAKIP OPD	Nilai	71 (BB)	

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Perubahan Anggaran (DPPA 2024)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Pelayanan OPD Sesuai Tupoksinya	Nilai	89	Rp 6,099,194,000
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan baik dan tepat waktu	Kategori Nilai	100%	Rp 20,000,000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP	SAP	100%	Rp 5,064,728,000
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persen	100%	Rp 10,000,000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100%	Rp 25,000,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Persen	100%	Rp 149,200,000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persen	100%	Rp 227,004,000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100%	Rp 603,262,000
	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat		Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3	Persen	100%	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100%	Rp 4,985,456,000
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100%	Rp 225,000,000
	Meningkatnya penegakan perda		Persentase Penegakan PERDA	Persen	100%	
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	Persen	100%	Rp 4,735,456,000
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	Persen	100%	Rp 25,000,000
	Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif		Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100%	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kab/Kota	Persen	100%	Rp 938,868,000
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kab/Kota	Persen	100%	Rp 893,868,000
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Pengendalian Kebakaran	Persen	100%	Rp 15,000,000
		Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase pengendalian kebakaran	Persen	100	Rp 5,000,000
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pengendalian kebakaran	Persen	100%	Rp 25,000,000
TOTAL						Rp 12,023,518,000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah Tahun 2024 (setelah perubahan)

Perubahan Program dan kegiatan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2024 yaitu 3 Program dan 14 kegiatan serta anggaran sebesar Rp. 12,023,518,000,- (*Dua belas miliar dua puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu rupiah*).

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Untuk mempermudah Interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran apakah melebihi target sesuai target dan tidak mencapai target, digunakan skala pengukuran dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	KRITERIA Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Kemudian dianalisis untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang timbul, serta apakah kriteria yang telah ditentukan sudah cukup memadai untuk menilai, menggambarkan indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja yang telah dicapai.

Dalam laporan ini, Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah.

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2						
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)						
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024						
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Realisasi Capaian %
1.	Terwujudnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai Mutu Kepuasan Masyarakat	89	93	104%
			Nilai akuntabilitas kinerja	71 (BB)	71.10 (BB)	100%
			Kinerja Laporan Keuangan	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2.	Terwujudnya ketertiban dan Keamanan yang kondusif	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Kententraman dan Keindahan)	100%	100%	100%
		Meningkatnya Penegakan Perda	Persentase Penegakan Perda	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya Penanggulang an Kebakaran yang handal dan efektif	Meningkatnya Penanggulang an kebakaran Secara Dini dan Komprehensif	Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Respon Time Rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	85%	100%	100%

Sumber: Laporan Monev Renja Tahun 2024

Uraian penjelasan tabel :

- 1. Tujuan Terwujudnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik
  - 1.1 Sasaran Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik
    - a. Nilai Mutu Kepuasan Masyarakat

Penilai mutu kepuasan pelayanan berdasarkan Laporan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja nilai mutu kepuasan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 terealisasi dengan nilai mutu pelayanan sebesar 93 dari target 89. Dari hasil evaluasi tabel di atas juga dapat di simpulkan bahwa capaian kinerja dari Indikator sasaran Nilai mutu kepuasan pelayanan adalah sebesar 104%.

Adapun yang menjadi unsur penilaian nilai mutu kepuasan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2024 yaitu berdasarkan hasil

pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 331 orang responden, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3  
Jumlah Responden SKM

No.	Karakteristik	Indikator	Jumlah	Persentase
1	JENIS KELAMIN	LAKI	237	74%
		PEREMPUAN	95	27%
2	PENDIDIKAN	SD	1	0,4%
		SLTP	0	0%
		SLTA	151	66,5%
		DIII	80	3,1%
		SI	89	25,1%
		S2	10	4,4%
		S3	1	0,4%
3	PEKERJAAN	PNS	92	26,7%
		TNI	0	0%
		SWASTA	77	1,8%
		WIRAUSAHA	6	2,7%
		LAINNYA	155	68,9%

Sumber: Laporan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2024

Tabel 3.4  
Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,7	3,7	3,6	3,6	3,6	3,7	3,7	3,6	3,8
Kategori	B	B	B	A	B	B	B	B	A
IKM Unit Layanan	93,00 (B atau Baik)								

Sumber: Laporan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2024

Dalam melakukan tugas melaksanakan tugas Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah dapat disimpulkan :

- Pelaksanaan pelayanan publik di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang **Sangat Baik** dengan nilai SKM **93**
- Meskipun hasil pengukuran pelayanan menunjukkan hasil memuaskan , segenap aparatur di Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di tahun 2025 dan seterusnya.

b. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Indikator kinerja sasaran nilai akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Pada Tahun 2024 tercapai sebesar 71.10 atau BB. Adapun



penilaian kriteria tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.5 Penilaian Kriteria Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2024**

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Capaian 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,45
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,60
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,05
4.	Evaluasi Internal	25	17,25
	Hasil Evaluasi	100	71.10 ( BB )

Sumber : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 (No Surat Inspektorat 710/79/ITDAKAB/2024 ( tgl 27 Mei 2024)

Nilai Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tercapai 71.10 atau tercapai BB. Nilai akuntabilitas kinerja Satpol PP pada akhir RPJMD di targetkan mencapai nilai BB.

**c. Kinerja Laporan Keuangan Satpol PP**

Pada tahun 2024 nilai evaluasi Laporan Keuangan (LK) Satuan Polisi Pamong Praja terhadap LK Tahun Anggaran 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah ditargetkan **Sesuai** dan terealisasi **Sesuai**. Hal ini turut mendukung predikat WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

**2. Tujuan Terwujudnya Ketertiban dan Keamanan yang Kondusif**

**2.1 Sasaran Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat**

**a. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Kententraman dan Keindahan)**

Indikator Sasaran Kinerja Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Kententraman dan Keindahan) Merupakan Indikator kinerja utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2024 mempunyai target kinerja sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100% atau tercapai 100%. Artinya hasil penyelesaian gangguan Ketertiban dan ketentraman umum pada tahun 2024 sebesar 100% dan tidak ada hambatan dalam penyelesaian gangguan Ketertiban dan ketentraman umum. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah terus melakukan penertiban dalam rangka untuk mengurangi atau menekan meningkatnya gangguan Ketertiban dan ketentraman umum di Kabupaten Bangka Tengah.

Dari hasil tabel di atas, dapat dilihat bahwa Realisasi **Kinerja Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Kententraman dan Keindahan)** di tahun 2024 sangat baik dikarenakan jumlah gangguan Ketertiban dan ketentraman umum pada Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada warga negara khususnya masyarakat yang terkena dampak kerugian materi dalam penegakan Perda dan Perkada.

Adapun data gangguan Ketertiban dan Ketentraman umum pada Tahun 2024 maupun jumlah yang ditindak lanjuti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO.	JENIS KEGIATAN	JUMLAH PELANGGARAN	JUMLAH PENYELESAIAN PELANGGARAN	YANG TIDAK TERSELESAIKAN
1.	LAPORAN MASYARAKAT	92	92	-
2.	DIPANTAU / INISIATIF KEDINASAN	18	18	-
	JUMLAH	110	110	-

Tabel 3.6 Data Gangguan Ketertiban dan Ketentraman umum pada Tahun 2024

Pada Tahun 2024 pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan dapat diselesaikan sebesar 100%. Semua pelanggaran dapat diselesaikan sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku.

Indikator Sasaran Kinerja Kinerja Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Kententraman dan Keindahan) merupakan Indikator kinerja utama ( IKU ) Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun cara perhitungan dari indikator kinerja sasaran ini tahun 2024 dapat dilihat di bawah ini :

Jumlah Pelanggaran K3 tahun yang terselesaikan

Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP

x 100 %

=  $\frac{110}{110} \times 100 \%$

= **100 %**

## 2.2 Sasaran Meningkatnya Penegakan Perda

### a. Persentase Penegakan Perda

Pada tahun 2024 mempunyai target kinerja sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau tercapai 100%. Indikator sasaran Persentase penegakan perda adalah upaya pemerintah daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan gangguan pelanggaran Perda/Perkada dari tahun ke tahun sehingga dapat tercipta lingkungan masyarakat yang kondusif dan demokratis sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

Dari hasil tabel di atas dapat dilihat bahwa pelanggaran perda dan perkara dapat diselesaikan dengan capaian 100%. Semakin tinggi capaian persentase pelanggaran Perda/Perkada maka semakin besar upaya pemerintah daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengurangi atau menekan meningkatnya Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

Realisasi capaian persentase Penegakan Perda/Perkada di tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik dengan bekerjasama dengan masyarkat dan OPD terkait. Secara garis Pemerintah Daerah melalui satuan Polisi Pamong Praja terus untuk berupaya dalam mengatasi dan menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan masyarakat sehingga keamanan dan ketertiban lingkungan dapat tercipta dengan kondusif.

Berikut data pelanggaran Perda/perkada pada Tahun 2024 maupun jumlah yang ditindak lanjuti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO.	JENIS KEGIATAN	JUMLAH PELANGGARAN	JUMLAH PENYELESAIAN PELANGGARAN	YANG BELUM TERSELESAIKAN
1.	LAPORAN MASYARAKAT	16	16	-
2.	DIPANTAU / INISIATIF KEDINASAN	25	25	-
	JUMLAH	41	41	-

Tabel 3.7 Data Pelanggaran Perda/perkada pada Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa laporan masyarakat yang ditindaklanjuti sebanyak 16 pelanggaran dan terselesaikan sebanyak 16 pelanggaran tanpa ada kejadian yang merugikan warga negara yang terkena dampak penertiban perda/perkada. Kemudian sesuai dengan tugas dan pokok serta fungsi dari satuan polisi pamong praja melakukan kegiatan dilapangan yang terdapat sebanyak 25 pelanggaran dan secara langsung dapat diselesaikan dengan sangat kondusif, sehingga jumlah keseluruhan dari pelanggaran Perda/perkada pada Tahun 2024 yaitu sebanyak 25 pelanggaran.

Indikator kinerja Sasaran Persentase Penegakan Perda merupakan Indikator kinerja utama ( IKU ) Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun cara perhitungan Indikator kinerja Sasaran Persentase Penegakan Perda dapat dilihat di bawah ini :

Jumlah Penyelesaian penegakan Perda /Perkada

Jumlah Pelanggaran Perda/ Perkada

X 100%

=

41

41

X 100 %

=

100 %

Indikator sasaran persentase penegakan Perda adalah upaya pemerintah daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan perda dan perkara sehingga dapat tercipta lingkungan masyarakat yang kondusif dan demokratis sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

3. Tujuan Terwujudnya Penanggulangan Kebakaran yang Handal dan Efektif

3.1 Sasaran Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif

a. Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Indikator sasaran kinerja Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) pada tahun 2024 mempunyai target kinerja sebesar 85% dan terealisasi sebesar 100% atau tercapai 100%. Dari hasil tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen

Kebakaran (WMK) sesuai target. Hal ini terjadi dikarenakan cepat tanggapnya (respon time) dari relawan pemadam kebakaran dalam menyelesaikan kebakaran. Semakin tinggi capaian Tingkat Waktu tanggap (Respon Rate Time) wilayah kebakaran maka semakin cepat upaya penanganan pemerintah daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja untuk menanggulangi bencana kebakaran.

Capaian Persentase tingkat waktu tanggap terhadap bencana kebakaran tahun 2024 mengalami penyelesaian yang cukup baik artinya tingkat waktu tanggap terhadap kebakaran mengalami pencapaian target pada Tahun 2024.

Adapun data Jumlah kejadian Kebakaran Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel Kegiatan Peningkatan Operasi Pemadam Kebakaran di WMK Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 di bawah ini:

Kegiatan Peningkatan Operasi Pemadam Kebakaran di WMK  
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

NO	DAERAH TERKENA BENCANA	JENIS BENCANA	JUMLAH BENCANA	JUMLAH BENCANA YG TERTANGANI DLM WKT MAKS.15 MENIT	JUMLAH KASUS KEBAKARAN DALAM JANGKAUAN WMK
1.	KECAMATAN KOBAB	KEBAKARAN	6	6	6
		KARHUTLA	28	28	28
	JUMLAH		34	34	34
2.	KECAMATAN LUBUK BESAR	KEBAKARAN	-	-	-
		KARHUTLA	4	4	4
	JUMLAH		4	4	4
3.	KECAMATAN SIMPANG KATIS	KEBAKARAN	4	4	4
		KARHUTLA	-	-	-
	JUMLAH		4	4	4
4.	KECAMATAN SUNGAI SELAN	KEBAKARAN	3	3	3
		KARHUTLA	1	1	1
	JUMLAH		4	4	4
5.	KECAMATAN NAMANG	KEBAKARAN	1	1	1
		KARHUTLA	5	5	5
	JUMLAH		6	6	6
6.	KECAMATAN PANGKALAN BARU	KEBAKARAN	6	6	6
		KARHUTLA	16	16	16
	JUMLAH		22	22	22
JUMLAH KEBAKARAN			20	20	20
JUMLAH KARHUTLA			54	54	54
TOTAL KEJADIAN			74	74	74

Tabel 3.8 Kegiatan Peningkatan Operasi Damkar di WMK Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

Realisasi Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di tahun 2024 mempunyai target sebesar 85% atau dengan capaian sebesar 100%. Jumlah kejadian kebakaran dalam jangkauan wilayah kebakaran pada tahun 2024 adalah sebanyak 74 kejadian kebakaran dengan jumlah kebakaran yang tertangani oleh Satuan polisi pamong praja khususnya bidang pemadam kebakaran dalam waktu maksimal 15 menit adalah sebanyak 74 kejadian kebakaran, total kebakaran sebanyak 20 Kejadian dan total Kebakaran Karhutla sebanyak 54 kejadian yang terjadi diwilayah Kabupaten Bangka Tengah selama Tahun 2024.

Indikator Sasaran Kinerja Tingkat waktu tanggap (respon rate time) wilayah kebakaran merupakan Indikator kinerja utama ( IKU ) Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun cara perhitungan dari indikator kinerja sasaran ini dapat dilihat di bawah ini :

*Tingkat waktu tanggap (respon rate time ) wilayah Kebakaran*

=

Jmlh kasus kebakaran di wilayah kebakaran yg tertangani  
dlm wktu maks.l 15 mnt

Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan wilayah  
manajemen kebakaran

X 100

=

74

74

X 100 %

= 100 %

Selain dari penanggulangan bencana kebaran Satuan Polisi Pamong Praja khususnya bidang Pemadam Kebakaran juga menangani evakuasi Penyelamatan Non Kebakaran. Berikut Daftar Laporan Giat Evakuasi Penyelamatan tahun 2024 :

No.	Lokasi	Jenis Kejadian	Jumlah Kejadian
1.	Kecamatan Koba	Evakuasi Ular	63
		Evakuasi Lebah/Tawon/Madu	23
		Evakuasi Anjing/Kucing/Musang	6
		Evakuasi Biawak	1
		Evakuasi Tokek	1
		Evakuasi Sapi	1
		Evakuasi Lumba-lumba	1
		Evakuasi Pohon	1
		Evakuasi Cincin	3
		Evakuasi Kunci Motor	2
		Evakuasi Mobil	1
		Evakuasi HP	3
2.	Kecamatan Lubuk Besar	Evakuasi Ular	4
3.	Kecamatan Simpang Katis	Evakuasi Ular	10
		Evakuasi Lebah/Tawon/Madu	5
		Evakuasi Ulat Bulu	1
4.	Kecamatan Sungai Selan	Evakuasi Ular	1
		Evakuasi Lebah/Tawon/Madu	2
		Evakuasi Buaya	1
5.	Kecamatan Namang	Evakuasi Ular	1
6.	Kecamatan Pangkalan Baru	Evakuasi Lebah/Tawon/Madu	3
		Evakuasi Biawak	1
JUMLAH			135

Tabel 3.9 Daftar Laporan Giat Evakuasi Penyelamatan tahun 2024

➤ **Perbandinagn Capaian Kinerja**

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10  
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Terwujudnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai Mutu Kepuasan pelayanan	80	88,74	110,92%	89	93	104.49%
			Nilai SAKIP OPD	(64) BB	(64,47) BB	100%	71 (BB)	71.10 (BB)	100%
			Kinerja Laporan Keuangan	Sesuai	Sesuai	100%	Sesuai	Sesuai	100%
2.	Terwujudnya ketertiban dan Keamanan yang kondusif	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Tingkat penyelesaian K3 (Ketertiban, Kententraman dan Keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Penegakan Perda	Persentase Penegakan Perda	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya Penanggulangan Kebakaran yang handal dan efektif	Meningkatnya Penanggulang an kebakaran Secara Dini dan Komprehensif	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	85%	100%	100%	85%	100%	100%

Uraian penjelasan tabel :

1. Tujuan Terwujudnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik  
1.1 Sasaran Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Sasaran Strategi	Indikator Sasaran	2023			2024			Akhir RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya kualitas akuntanbilitas kinerja dan pelayanan Publik	Nilai mutu kepuasan pelayanan	80	88,74	110,92%	89	93	104.49%	80	100%
	Nilai akuntanbilitas kinerja	BB	BB	100%	(71) BB	(71.10) BB	100%	(80) A	100%
	Kinerja Laporan Keuangan Satpol PP	Sesuai	Sesuai	100%	Sesuai	Sesuai	100%	sesuai	100%

Tabel 3.11 Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 pada Terwujudnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik

a. Nilai Mutu Kepuasan Pelayanan Masyarakat

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja nilai mutu kepuasan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka

Tengah tahun 2023 terealisasi dengan nilai mutu pelayanan sebesar 88,74 dari target 80 dengan capaian 110,92% dan pada tahun 2024 terealisasi 93 dari target 89 dengan capaian 104,49%. Terdapat peningkatan kualitas pelayanan Masyarakat yang tercermin dari kenaikan nilai kepuasan pelayanan dari tahun 2023 ke 2024, capaian kinerja tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik dan mendekati atau bahkan melebihi target yang ditetapkan

**b. Nilai Akuntabilitas Kinerja**

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja nilai Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023 terealisasi dengan nilai BB dari target BB dengan capaian 100%. Dan tahun 2024 terealisasi dengan nilai 71,10 (BB) dari target 71 (BB) dengan capaian 100%.

**c. Kinerja Laporan Keuangan**

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja nilai Kinerja Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023 sama dengan tahun 2024 terealisasi **Sesuai** dengan capaian 100%.

**2. Tujuan Terwujudnya Ketertiban dan Keamanan yang Kondusif**

**2.1 Sasaran Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat**

Sasaran Strategi Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat dengan indikator Sasaran sebagai berikut :

**a. Tingkat penyelesaian K3 (Ketertiban, Kententraman dan Keindahan)**

Adapun Perbandingan target serta realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024 dari sasaran strategis pertama ini dapat dilihat pada analisis capaian kinerja di bawah ini :

No	Indikator Sasaran	2023			2024			Akhir RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Kententraman dan Keindahan)	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.12 Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan 2023 pada Tingkat Penyelesaian K3

Dari hasil tabel di atas, dapat dilihat bahwa Realisasi Kinerja Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Kententraman dan Keindahan) di tahun 2023 sama halnya dengan realisasi kinerja di tahun 2024 sangat baik dikarenakan jumlah gangguan Ketertiban dan ketentraman umum pada Tahun 2024 sebanyak 110 pelanggaran dapat terselesaikan dengan baik atau capaian realisasi 100%. Meskipun ada peningkatan jumlah total pelanggaran K3 dari 103 di 2023 menjadi 110 di 2024, ada variasi signifikan antar kecamatan.



Adanya peningkatan pelanggaran di kecamatan Koba, sementara sebagian besar kecamatan lainnya menunjukkan penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara total ada sedikit peningkatan, ada perbaikan dalam beberapa kecamatan yang berhasil menurunkan pelanggaran K3 secara signifikan. Penyelesaian atau penanganan yang efektif terhadap pelanggaran K3 sangat penting untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan.

Adapun Perbandingan Jumlah pelanggaran ketertiban, ketentraman dan Keindahan (K3) pada tahun 2023 dengan tahun 2024 dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

NO.	LOKASI	JENIS PELANGGARAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	KEC. KOB	TIBUMTRANMAS	20	98	78
		UNJUK RASA / DEMO	2	1	(1)
		JUMLAH	22	99	77
2	KEC. LUBUK BESAR	TIBUMTRANMAS	15	2	(13)
		UNJUK RASA / DEMO	-	1	1
		JUMLAH	15	3	(12)
3	KEC. SIMPANG KATIS	TIBUMTRANMAS	13	1	(12)
		UNJUK RASA / DEMO	-	-	
		JUMLAH	13	1	(12)
4	KEC. SUNGAI SELAN	TIBUMTRANMAS	15	2	(13)
		UNJUK RASA / DEMO	-	-	-
		JUMLAH	15	2	(13)
5	KEC. NAMANG	TIBUMTRANMAS	18	3	(15)
		UNJUK RASA / DEMO	-	-	-
		JUMLAH	18	3	(15)
6	KEC. PANGKALAN BARU	TIBUMTRANMAS	20	2	(18)
		UNJUK RASA / DEMO	-	-	
		JUMLAH	20	2	(18)
JUMLAH TOTAL			103	110	7

Tabel 3.13 Perbandingan Jumlah Pelanggaran K3 tahun 2024 dengan Tahun 2023

2.2 Sasaran Meningkatnya Penegakan Perda

Sasaran Strategi Meningkatnya Penegakan Perda dengan indikator Sasaran sebagai berikut :

a. Persentase Penegakan Perda

Adapun perbandingan target serta realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024 dari sasaran strategis kedua ini dapat dilihat pada analisis capaian kinerja di bawah ini :

No	Indikator Sasaran	2023			2024			Akhir RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
2.	Persentase Penegakan perda/perkada	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%

Tabel 3.14 Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan 2023 pada Persentase Penegakan Perda

Dari hasil tabel di atas, Kinerja penegakan perda di tahun 2023 dan 2024 dapat dianggap sangat baik, karena target 100% tercapai 100% pada kedua tahun tersebut. Tidak ada penurunan dalam pencapaian indikator ini, yang mengindikasikan konsistensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Artinya gangguan pelanggaran Perda dapat diselesaikan dengan



mengacu kepada peraturan perundang-undangan, Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 pelanggaran perda terjadi sebanyak 82 kali dan di tahun 2024 pelanggaran perda/perkada terjadi sebanyak 41 kali pelanggaran. Penurunan jumlah pelanggaran Perda/Perkada dari 82 kali di 2023 menjadi 41 kali di 2024 menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum dan pengawasan telah efektif. Ini merupakan pencapaian yang baik dan mencerminkan peningkatan kualitas penegakan hukum serta kepatuhan terhadap peraturan daerah. Penurunan 50% ini juga menunjukkan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil untuk menanggulangi pelanggaran sudah membuahkan hasil yang positif.

Adapun Perbandingan Jumlah pelanggaran Perda pada tahun 2024 di banding dengan tahun 2023 dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

No	Kecamatan	Jenis Pelanggaran	Tahun 2023	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	KOBAB	Tambang Inkonvensional (TI)	-	14	14
		Miras/Mihol/Asusila	6	-	(6)
		Razia Pelajar	10	-	(10)
		Ilegal Loging	-	-	-
		Pengemis	-	-	-
		Pengamen	-	1	1
		PKL	-	6	6
		Prostitusi	-	-	-
		Tambang Pasir	-	-	-
		Reklame	-	-	-
		Jumlah	16	21	5
2	LUBUK BESAR	Tambang Inkonvensional ( TI )	15	-	(15)
		Miras/Mihol/Asusila	14	5	(9)
		Razia Pelajar	9	-	(9)
		Ilegal Loging	-	-	-
		Pengemis	-	-	-
		Pengamen	-	-	-
		PKL	-	-	-
		Prostitusi	-	1	1
		Tambang Pasir	-	2	2
		Reklame	-	-	-
		Jumlah	38	8	(30)
3	SIMPANG KATIS	Tambang Inkonvensional ( TI )	5	1	(4)
		Miras/Mihol/Asusila	3	1	(2)
		Razia Pelajar	-	-	-
		Ilegal Loging	-	-	-
		Pengemis	-	-	-
		Pengamen	-	-	-
		PKL	-	-	-
		Prostitusi	-	-	-
		Tambang Pasir	6	-	(6)
		Reklame	-	-	-
		Jumlah	14	2	(12)
4	SUNGAI SELAN	Tambang Inkonvensional ( TI )	5	-	(5)
		Miras/Mihol/Asusila	1	2	1
		Razia Pelajar	1	1	-
		Ilegal Loging	-	-	-
		Pengemis	-	-	-
		Pengamen	-	-	-
		PKL	1	-	(1)
		Prostitusi	-	-	-
		Tambang Pasir	-	-	-
		Reklame	-	-	-
		Jumlah	8	3	(5)
5	NAMANG	Tambang Inkonvensional ( TI )	1	1	-
		Miras/Mihol/Asusila	2	-	(2)
		Razia Pelajar	-	-	-
		Ilegal Loging	-	-	-
		Pengemis	-	-	-
		Pengamen	-	-	-

No	Kecamatan	Jenis Pelanggaran	Tahun 2023	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan
		PKL	-	-	-
		Prostitusi	-	-	-
		Tambang Pasir	-	-	-
		Reklame	-	1	1
		Jumlah	3	2	(1)
6	PANGKALAN BARU	Tambang Inkonvensional ( TI )	2	4	2
		Miras/Mihol/Asusila	1	-	(1)
		Razia Pelajar	-	-	
		Illegal Loging	-	-	
		Pengemis	-	-	
		Pengamen	-	-	
		PKL	-	-	
		Prostitusi	-	1	1
		Tambang Pasir	-	-	
		Reklame	-	-	
		Jumlah	3	5	2
		JUMLAH	82	41	(41)

Tabel 3.15 Perbandingan Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada tahun 2024 dengan Tahun 2023

Dari tabel pelanggaran Perda/Perkada di atas terjadi pelanggaran Perda/Perkada di 6 Kecamatan yaitu Koba, Lubuk Besar, Simpang Katis, Sungai Selan, Namang, dan Pangkalan Baru. Sama hal nya pada tahun 2023, Pelanggaran Perda/Perkada di tahun 2024 juga dapat teratasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara keseluruhan, penurunan jumlah pelanggaran pada tahun 2024 menunjukkan adanya perubahan pola pelanggaran Perda, dengan beberapa jenis pelanggaran yang berkurang signifikan di tahun 2024.

### 3. Tujuan Terwujudnya Penanggulangan Kebakaran yang Handal dan Efektif

#### 3.1 Sasaran Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif

Sasaran Strategi Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif dengan indikator Sasaran sebagai berikut :

##### a. Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Sasaran strategis tiga Satuan Polisi Pamong Praja adalah Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif dengan indikator sasaran yaitu Tingkat Waktu Tanggap (*Respon Time Rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Adapun perbandingan target serta realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024 dari sasaran strategis ketiga ini dapat dilihat pada analisis capaian kinerja di bawah ini :

No	Indikator Sasaran	2023			2024			Akhir RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
3.	Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Respon Rate Time</i> ) wilayah Kebakaran	85%	100%	100 %	85%	100%	100%	85%	85%

Tabel 3.16 Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan 2023 pada Tingkat Waktu Tanggap (*Respon Time Rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Dari hasil evaluasi tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari Indikator sasaran Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) tahun 2024 sama dibandingkan tahun 2023. Capaian Persentase tingkat waktu tanggap terhadap bencana kebakaran tahun 2023 senilai 100% dan pada tahun 2024 senilai 100% artinya mengalami penyelesaian yang sangat baik.

Adapun Perbandingan Jumlah Penanggulangan Kebakaran pada tahun 2024 di banding dengan tahun 2023 dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

NO	DAERAH TERKENA BENCANA	JENIS BENCANA	TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			JUMLAH BENCANA	JUMLAH BENCANA YG TERTANGANI DLM WKT MAKS.15 MENIT	JUMLAH BENCANA	JUMLAH BENCANA YG TERTANGANI DLM WKT MAKS.15 MENIT
1.	KECAMATAN KOBABESAR	KEBAKARAN	2	2	6	6
		KARHUTLA	153	153	28	28
	JUMLAH		155	155	34	34
2.	KECAMATAN LUBUK BESAR	KEBAKARAN	1	1	-	-
		KARHUTLA	4	4	4	4
	JUMLAH		5	5	4	4
3.	KECAMATAN SIMPANG KATIS	KEBAKARAN	2	2	4	4
		KARHUTLA	7	7	-	-
	JUMLAH		9	9	4	4
4.	KECAMATAN SUNGAI SELAN	KEBAKARAN	1	1	3	3
		KARHUTLA	2	2	1	1
	JUMLAH		3	3	4	4
5.	KECAMATAN NAMANG	KEBAKARAN	-	-	1	1
		KARHUTLA	6	6	5	5
	JUMLAH		6	6	6	6
6.	KECAMATAN PANGKALAN BARU	KEBAKARAN	-	-	6	6
		KARHUTLA	6	6	16	16
	JUMLAH		6	6	22	22
JUMLAH KEBAKARAN			6	6	20	20
JUMLAH KARHUTLA			178	178	54	54
TOTAL KEJADIAN			184	184	74	74

Tabel 3.17 Perbandingan Jumlah Penanggulangan Kebakaran pada TA. 2024 di banding dengan TA. 2023

Perbandingan jumlah penanggulangan kebakaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam jenis bencana kebakaran dan karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan). Penurunan jumlah karhutla secara keseluruhan (dari 178 kejadian di 2023 menjadi 54 kejadian di 2024) menjadi faktor utama dalam penurunan total kejadian bencana. Sementara itu, jumlah kebakaran meningkat di beberapa kecamatan seperti Koba, Simpang Katis, Sungai Selan, dan Pangkalan Baru. Namun, secara keseluruhan, penurunan kejadian karhutla mendominasi, menyebabkan total kejadian bencana menurun secara signifikan di tahun 2024.

➤ **Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah dan Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional.**

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.18**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7=5/6*100
1.	Terwujud nya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai Mutu Kepuasan pelayanan	93	80	116.25%
			Nilai akuntanbilitas kinerja	(71,10) BB	(80) (A)	A (80)
			Kinerja Laporan Keuangan	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2.	Terwujudnya ketertiban dan Keamanan yang kondusif	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Tingkat penyelesaian K3 (Ketertiban, Kententraman dan Keindahan)	100%	100%	100%
		Meningkatnya Penegakan Perda	Persentase Penegakan Perda	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya Penanggulangan Kebakaran yang handal dan efektif	Meningkatnya Penanggulang an kebakaran Secara Dini dan Komprehensif	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%	100%

Uraian penjelasan tabel :

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah mengalami peningkatan pada realisai Nilai Mutu Kepuasan Masyarakat yang target Renstra akhir 2026 yaitu sebesar 80, sedangkan pada tahun 2024 sudah mencapai realisasi sebesar 93 atau tercapai 116.25%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.19**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7=5/6*100
1.	Terwujud nya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai Mutu Kepuasan pelayanan	93	80 -100	93%
			Nilai akuntanbilitas kinerja	BB	A	BB
			Kinerja Laporan Keuangan	Sesuai	Sesuai	Sesuai

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
2.	Terwujudnya ketertiban dan Keamanan yang kondusif	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Tingkat penyelesaian K3 (Ketertiban, Kententraman dan Keindahan)	100%	100%	100%
		Meningkatnya Penegakan Perda	Persentase Penegakan Perda	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya Penanggulangan Kebakaran yang handal dan efektif	Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100 %	100 %	100 %

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.20**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2024	% Capaian 2024	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang dilakukan
1.	Terwujud nya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai Mutu Kepuasan pelayanan	89	93	105%	Berhasil	Lebih meningkat kan Kinerja
			Nilai akuntanbilas kinerja	71 (BB)	71.10 (BB)	100%	Berhasil	Lebih meningkat kan Kinerja
			Kinerja Laporan Keuangan	100%	Sesuai	100%	Berhasil	Lebih meningkat kan Kinerja
2.	Terwujudnya ketertiban dan Keamanan yang kondusif	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Tingkat penyelesaian K3 (Ketertiban, Kententraman dan Keindahan)	100%	100%	100%	Berhasil	Lebih meningkat kan Kinerja
		Meningkatnya Penegakan Perda	Persentase Penegakan Perda	100%	100%	100%	Berhasil	Lebih meningkat kan Kinerja
3.	Terwujudnya Penanggulanga n Kebakaran yang handal dan efektif	Meningkatnya Penanggulanga n kebakaran Secara Dini dan Komprehensif	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%	100%	Berhasil	Lebih meningkat kan Kinerja

Uraian penjelasan tabel :

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan sudah dianggap berhasil karna rata-rata sasaran telah mencapai 100%. Dan Satuan Polisi Pamong Praja akan tetap berusaha meningkatkan kinerja di tahun berikutnya.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.21  
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian %	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terwujudnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai SAKIP OPD	(71.10) BB					Menunjang
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai Mutu Kepuasan pelayanan	93					Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Pelayanan OPD Sesuai Tupoksinya	Persen	100%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan baik dan tepat waktu	Persen	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP	SAP	Sesuai	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persen	100%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Persen	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persen	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100%	Menunjang
	Terwujudnya ketertiban dan Keamanan yang kondusif	Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3	100%					Menunjang
	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3	100%					Menunjang
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100%	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian %	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100%	Menunjang
	Meningkatnya penegakan perda	Persentase Penegakan Perda/Perkaa (PERDA)	100%		<b>Persentase Penegakan PERDA</b>	<b>Persen</b>		<b>Menunjang</b>
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	Persen	100%	Menunjang
				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	Persen	100%	Menunjang
	Terwujudnya Penanggulangan Kebakaran yang handal dan efektif	Persentase peningkatan respon penanganan kebakaran	100					Menunjang
	Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100					Menunjang
				<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kab/Kota</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>Menunjang</b>
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kab/Kota	Persen	100%	Menunjang
				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Pengendalian Kebakaran	Persen	100%	Menunjang
				Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase pengendalian kebakaran	Persen	100%	Menunjang
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pengendalian kebakaran	Persen	100%	Menunjang

Uraian penjelasan tabel :

Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan sudah dianggap berhasil karna rata2 sasaran telah mencapai 100%. Dan seluruh Program dan Kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja dianggap menunjang pencapaian pernyataan kinerja.

### B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.22

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN TA. 2024	REALISASI TA. 2024	CAPAIAN (%)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Rp 6,099,194,000</b>	<b>Rp 5,382,049,070</b>	<b>88.24</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 20,000,000	Rp 19,084,902	95.42
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5,064,728,000	Rp 4,519,156,687	89.23
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp 10,000,000	Rp 6,940,000	69.40
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 25,000,000	Rp 10,075,700	40.30
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 149,200,000	Rp 146,948,071	98.49
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 227,004,000	Rp 191,412,676	84.32
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 603,262,000	Rp 488,431,034	80.96
<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Rp 4,985,456,000</b>	<b>Rp 4,877,938,846</b>	<b>97.84</b>
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 225,000,000	Rp 218,279,412	97.01
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp 4,735,456,000	Rp 4,637,736,629	97.94
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rp 25,000,000	Rp 21,922,805	87.69
<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Rp 938,868,000</b>	<b>Rp 821,836,629</b>	<b>87.53</b>
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 893,868,000	Rp 787,516,629	88.10
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Rp 15,000,000	Rp 12,860,000	85.73
Investigasi Kejadian Kebakaran	Rp 5,000,000	Rp 1,320,000	26.40
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Rp 25,000,000	Rp 20,140,000	80.56
<b>Total</b>	<b>Rp 12,023,518,0000</b>	<b>Rp 11.081.824.545</b>	<b>92.17</b>

C. TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.23

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai SAKIP OPD & Nilai Mutu Kepuasan pelayanan	89 71 (BB) Sesuai	93 71.10 (BB) Sesuai	110,92 100% 100%	Rp. 6.099.194.000	Rp. 5.382.049.070	88.24	
Terwujudnya ketertiban dan Keamanan yang kondusif	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3	100%	100%	100%	Rp. 225.000.000	Rp. 218.279.412	97.01	
	Meningkatnya penegakan perda	Persentase Penegakan Perda/Perkaa (PERDA)	100%	100%	100%	Rp. 4.760.456.000	Rp. 4.659.659.434	97.88	
Terwujudnya Penanggulangan Kebakaran yang handal dan efektif	Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%	100%	Rp. 938.868.000	Rp. 821.836.629	87.53	
TOTAL						Rp. 12.023.518.000	Rp. 11.081.824.545	92.17	

Uraian penjelasan tabel :

**a.Sasaran Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik**

Sasaran Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 6.099.194.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.382.049.070,- atau tercapai 88.24%. Indikator dari Sasaran Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik adalah Nilai SAKIP OPD & Nilai Mutu Kepuasan pelayanan. Dimana realisasi Nilai Mutu Kepuasan Masyarakat yaitu **93** dari target **89** atau sebesar **104%** dan realisasi Nilai SAKIP OPD **BB (71.10)** dan realisasi Kinerja Laporan Keuangan **Sesuai**.

**b.Sasaran Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat**

Sasaran Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 225.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 218.279.412,- atau tercapai 97.01%. namun realisasi kinerja mencapai 100% hasil yang sangat baik.

**c.Meningkatnya Penegakan Perda**

Sasaran Meningkatnya Penegakan Perda memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 4.760.456.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.659.659.434,- atau tercapai 97.88%. Dan realisasi kinerja mencapai 100% dengan hasil yang sangat baik.

**d.Sasaran Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif**

Dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif didukung oleh indikator kinerja sasaran yaitu Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), Sasaran Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kab/Kota dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Dan memiliki alokasi Anggaran sebesar Rp. 938.868.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 821.836.629,- atau tercapai sebesar 87.53 %.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.24**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran TA. 2024			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan OPD Sesuai Tupoksinya	(79) BB	(79) BB	100%	Rp 6,099,194,000	Rp 5,382,049,070	88.24	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	100%	100%	100%	Rp 20,000,000	Rp 19,084,902	95.42	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	Rp 15,000,000	Rp 14,544,902	96.97	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	100%	Rp 5,000,000	Rp 4,540,000	90.80	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP	Sesuai	Sesuai	100%	Rp 5,064,728,000	Rp 4,519,156,687	89.23	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/12 Bulan	50 Orang/12 Bulan	100%	Rp 5,054,728,000	Rp 4,510,876,687	89.24	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	Rp 5,000,000	Rp 4,320,000	86.40	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	3 Laporan	75%	Rp 5,000,000	Rp 3,960,000	79.20	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Rp 10,000,000	Rp 6,940,000	69.40	
6	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	Rp 5,000,000	Rp 3,730,000	74.60	
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100%	Rp 5,000,000	Rp 3,210,000	64.20	

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran TA. 2024			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Rp 25,000,000	Rp 10,075,700	40.30	
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang/ Kali	3 Orang/ Kali	100%	Rp 25,000,000	Rp 10,075,700	40.30	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	100%	100%	Rp 149,200,000	Rp 146,948,071	98.49	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%	Rp 5,000,000	Rp 4,985,000	99.70	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%	Rp 18,000,000	Rp 17,536,000	97.42	
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%	Rp 15,000,000	Rp 14,995,000	99.97	
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%	Rp 10,000,000	Rp 9,448,600	94.49	
13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	Rp 1,200,000	Rp 1,050,000	87.50	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49 Laporan	48 Laporan	98%	Rp 100,000,000	Rp 98,933,471	98.93	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100%	100%	100%	Rp 227,004,000	Rp 191,412,676	84.32	
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%	Rp 84,686,000	Rp 55,125,544	65.09	
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	Rp 21,000,000	Rp 18,234,124	86.83	
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	Rp 121,318,000	Rp 118,053,008	97.31	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	Rp 603,262,000	Rp 488,431,034	80.96	
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%	Rp 70,542,000	Rp 69,834,622	99.00	
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	100%	Rp 505,720,000	Rp 395,523,412	78.21	
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit	100%	Rp 20,000,000	Rp 17,705,000	88.53	

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran TA. 2024			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit (401 M2)	1 Unit (401 M2)	100%	Rp 7,000,000	Rp 5,368,000	76.69	
II	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 4,985,456,000</b>	<b>Rp 4,877,938,846</b>	<b>97.84</b>	
8	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 225,000,000</b>	<b>Rp 218,279,412</b>	<b>97.01</b>	
22	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	Rp 35,000,000	Rp 28,515,308	81.47	
23	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	60 Laporan	60 Laporan	100%	Rp 150,000,000	Rp 149,851,124	99.90	
24	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	30 Laporan	30 Laporan	100%	Rp 40,000,000	Rp 39,912,980	99.78	
9	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 4,735,456,000</b>	<b>Rp 4,637,736,629</b>	<b>97.94</b>	
25	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	12 Laporan	100%	Rp 25,000,000	Rp 24,995,260	99.98	
26	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	12 Laporan	100%	Rp 4,710,456,000	Rp 4,612,741,369	97.93	
10	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan</b>	<b>100%</b>	<b>83%</b>	<b>83%</b>	<b>Rp 25,000,000</b>	<b>Rp 21,922,805</b>	<b>87.69</b>	
27	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	6 Laporan	5 Laporan	83%	Rp 25,000,000	Rp 21,922,805	87.69	

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran TA. 2024			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pengendalian Kebakaran	100%	100%	100%	Rp 938,868,000	Rp 821,836,629	87.53	
11	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kab/Kota	100%	100%	100%	Rp 893,868,000	Rp 787,516,629	88.10	
28	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100%	Rp 850,868,000	Rp 755,940,164	88.84	
29	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	Rp 20,000,000	Rp 19,496,465	97.48	
30	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	Rp 13,000,000	Rp 7,210,000	55.46	
31	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	Rp 10,000,000	Rp 4,870,000	0.00	
12	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase pengendalian kebakaran	100%	100%	100%	Rp 15,000,000	Rp 12,860,000	85.73	
32	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	Rp 15,000,000	Rp 12,860,000	85.73	
13	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase pengendalian kebakaran	100%	25%	25%	Rp 5,000,000	Rp 1,320,000	26.40	
33	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	20 Dokumen	5 Dokumen	25%	Rp 5,000,000	Rp 1,320,000	26.40	
14	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pengendalian kebakaran	100%	97%	97%	Rp 25,000,000	Rp 20,140,000	80.56	

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran TA. 2024			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
34	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	30 Orang	29 Orang	97%	Rp 25,000,000	Rp 20,140,000	80.56	
TOTAL						Rp 12,023,518,000	Rp 11,081,824,545	92.17	

Uraian penjelasan tabel :  
Selain Program pendukung Indikator Kinerja Sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki program pendukung yang bersifat rutin untuk menunjang kinerja kesekretariatan. Adapun Program dan kegiatan rutin tersebut dari segi target dan realisasi beserta persentase realisasi capaian dapat dilihat sebagai berikut :

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 6.099.194.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.382.049.070,- atau tercapai 88,24%. Indikator dari program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini adalah Indeks Pelayanan OPD Sesuai Tupoksinya selama 12 bulan. Dimana realisasi fisik dari program ini tercapai 100% dari target 100%.

Program ini terdiri dari 7 kegiatan dan 21 Sub kegiatan, adapun kegiatan beserta penjelasannya yaitu :

**1. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

**1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.544.902,- atau 96.97%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 5 Dokumen. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100% dengan realisasi 5 Dokumen.

**2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.540.000,- atau 90,80%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 5 Laporan. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100% dengan realisasi 5 Laporan.

**2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

**1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 5.054.728.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.510.876.687,- atau 89.24%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 50 orang per 12

bulan. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100% dengan realisasi 50 orang Per 12 bulan.

## **2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.320.000,- atau 86,40%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target 1 Laporan. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100% dengan realisasi 1 Laporan per tahun.

## **3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD**

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.960.000,- atau 79,20%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan target 4 Laporan. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 75% dengan realisasi 3 Laporan per tahun.

# **3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**

## **1) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD**

Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.730.000,- atau 74,60%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD dengan target 12 Laporan. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100% dengan realisasi 12 Laporan per tahun.

## **2) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD**

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.210.000,- atau 64,20%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan target 2 Laporan. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100% dengan realisasi 2 Laporan per tahun.

# **4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

## **1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**



Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.075.700,- atau 40,30 %. Output kegiatan ini adalah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan target 3 orang/kali. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100% Realisasi fisik dengan realisasi 3 orang/kali.

## **5. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

### **1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.985.000,- atau 99,70%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan target 12 Paket selama. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100% dengan realisasi 12 Paket selama 12 bulan.

### **2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.536.000,- atau 97,42%. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target 12 paket. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100% dengan realisasi 12 bulan selama 12 bulan.

### **3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Sub Kegiatan penyediaan makanan dan minuman memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.995.000,- atau tercapai 99,97%. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dengan target 12 paket selama 12 bulan. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100% dengan realisasi 12 paket.

### **4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Sub Kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.9.448.600,- atau tercapai 100%. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan target 12 paket selama 12 bulan. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100% dengan realisasi 12 paket.

### **5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Sub Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 1.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.050.000,- atau tercapai 87,50%. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan



PerundangUndangan yang Disediakan dengan target 12 Dokumen. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100% dengan realisasi 12 Dokumen.

#### **6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 98.933.471,- atau tercapai 98,93%. Output Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Target 49 Laporan. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 98% dengan realisasi 48 laporan.

### **6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

#### **1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Sub Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 84.686.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 55.125.544,- atau tercapai 65,09%. Target out put dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 12 Laporan selama 12 bulan. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100% dengan realisasi 12 Laporan selama 12 bulan.

#### **2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Sub Kegiatan penyediaan komunikasi air dan listrik memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 21.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.234.124,- atau tercapai 86,83%. Target out put dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target 12 Laporan selama 12 bulan. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100% dengan realisasi 12 Laporan selama 12 bulan.

#### **3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor alokasi anggaran sebesar Rp. 121.218.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 118.053.008,- atau tercapai 97,31%. Target out put dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target 12 Laporan selama 12 bulan. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100% dengan realisasi 12 Laporan selama 12 bulan.

### **8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

#### **1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.**

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 70.542.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 69.834.622,- atau tercapai 99%. Target output dari kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 unit selama 12 bulan. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100%.

**2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.**

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan alokasi anggaran sebesar Rp. 505.720.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 395.523.412,- atau tercapai 78,21%. Target output dari kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 12 unit selama 12 bulan. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100%.

**3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.705.000 atau tercapai 88,53%. Target output dari kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 13 Unit. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100%.

**4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.**

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.368.000,- atau tercapai 76.69%. Target output dari kegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi sebanyak 1 unit selama 12 bulan. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100%.

Guna mendukung tercapainya sasaran ***Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat*** yaitu ***Tingkat penyelesaian K3 (Ketertiban, Kententraman dan Keindahan)*** dan ***Persentase Penegakan Perda***

Adapun Program dan kegiatan tersebut dari segi target dan realisasi beserta persentase realisasi capaian dapat dilihat sebagai berikut :

**b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 4.985.456.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.877.938.846,- atau tercapai 97.84%. Dimana realisasi fisik dari indikator program ini tercapai 100% dari target 100%.

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 6 Sub kegiatan yaitu :

**1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.**

Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 225.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 218.279.412,- atau terealisasi sebesar

97,01%. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100%. Output kegiatan ini adalah terealisasinya kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 110 kali penyelesaian dari target 110 kali penertiban pelanggaran yang terdiri dari Patroli (4 kali), Pengamanan (91 kali), Pengawasan (1 kali) serta Penindakan (14 kali).

**1) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.**

Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan Indikator sasaran Kinerja Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan dalam mendukung penurunan gangguan ketertiban dan keamanan serta perlindungan masyarakat. Adapun alokasi anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.515.308,- atau terealisasi sebesar 81,47%. Target output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan target 12 dokumen. Realisasi Fisik kegiatan ini tercapai 100% dengan realisasi 12 Dokumen.

**2) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.**

Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 149.851.124,- atau terealisasi sebesar 99,90%. Target output dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan sebanyak 12 Laporan. Realisasi Fisik kegiatan ini tercapai 100% dengan realisasi 12 Laporan.

**3) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.**

Sub kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 39.912.980,- atau terealisasi sebesar 99,78%. Target output dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan

Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan dengan target 30 Laporan.  
Realisasi Fisik kegiatan ini tercapai 100% dengan realisasi 30 Laporan

## **2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.**

Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 4.735.456.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.637.736.629,- atau terealisasi sebesar 97,94%. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100%. Output kegiatan ini adalah terealisasinya kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota sebanyak 41 kali penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada dari yang ditetapkan target sebanyak 41 kali pelanggaran perda.

### **1) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.**

Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota memiliki alokasi anggaran sebesar Rp.25.000.000,- dan terealisasi Rp. 24.995.260,- atau terealisasi sebesar 99,98%.

Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100%. Output kegiatan ini Pertama adalah terlaksananya pemberian 1 sangsi yang diberikan terhadap pelanggaran perda/perkada yaitu tentang jual beli miras di kecamatan koba, output kedua adalah terlaksananya operasional Penertiban Pajak Daerah sebanyak 24 kali di 6 kecamatan kabupaten bangka tengah, output ketiga adalah terlaksananya penyelidikan yang terindikasi pelanggaran Perda dan Perkada sebanyak 5 kali. Dan Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP sebanyak 12 Laporan.

### **2) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota**

Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota memiliki alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 4.710.456.000,-. Anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 4.612.741.369,-. atau tercapai 97,93%. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100%. Output kegiatan ini adalah terbayarkannya gaji anggota Satpol pp honorer sebanyak 154 orang selama 12 bulan dan honor piket jaga malam anggota Satpol PP di 12 titik di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Dan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota sebanyak 12 Laporan.

## **3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**

Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.922.805,- atau terealisasi sebesar 87,69%. Realisasi fisik sub kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota adalah 100%. Output kegiatan ini yaitu terealisasinya koordinasi lintas sektoral (OPD) dan pengawasan PPNS di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 5 Kali (5 laporan).

#### **1) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS**

Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.922.805,- atau terealisasi sebesar 87,69%. Realisasi fisik sub kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota adalah 83%. Output kegiatan ini yaitu terealisasinya koordinasi lintas sektoral (OPD) dan pengawasan PPNS di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 5 Kali (5 laporan). Dan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada sebanyak 5 Laporan.

Dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif didukung oleh indikator kinerja sasaran yaitu Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), dalam menjalankan indikator kinerja sasaran Tingkat Waktu Tanggap (Respon Rate Time) wilayah Kebakaran didukung oleh 1 (satu) program dan kegiatan yang dijelaskan sebagaimana di bawah ini :

#### **c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan program untuk mendukung Indikator sasaran Kinerja Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Indikator kinerja dari program ini adalah Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kab/Kota dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%.

Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 938.868.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 821.836.629,- atau tercapai sebesar 87.53%. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran didukung oleh 4 kegiatan dan 7 Sub Kegiatan sebagai berikut :

##### **1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.**

Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 893.868.000,- terealisasi sebesar Rp. 1787.516.629,- atau terealisasi sebesar 88,10%. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100%. Output kegiatan ini adalah terealisasinya penyelesaian jumlah Kasus kebakaran dalam jangkauan WMK sebanyak 74 kali.

### **1) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 850.868.000 terealisasi sebesar Rp. 755.940.164,- atau terealisasi sebesar 88,84%.

Realisasi fisik kegiatan ini terealisasi sebesar 100% yaitu target output pertama kegiatan ini adalah kendaraan dinas/operasional pemadam kebakaran yang dipelihara yaitu sebanyak 4 unit, kemudian output kedua yaitu pembayaran honor dan uang jaga malam petugas pemadam kebakaran selama 12 bulan (18 honorer) yang di tempatkan pada dua pos di kecamatan koba dan kecamatan simpangkatis. Output yang ketiga adalah petugas yang mengikuti bimtek sebanyak 7 orang, output keempat yaitu terkendalinya kebakaran dalam daerah sebanyak 74 kali antara lain kebakakaran Pemukiman, hutan dan lahan. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 12 Laporan.

### **2) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran**

Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran pada anggaran APBD 2023 memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.496.465,- atau 97.48%.

Realisasi fisik kegiatan ini terealisasi sebesar 100% yaitu Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran yaitu Jumlah dokumen Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran dalam tingkat waktu tanggap di wilayah kebakaran sebanyak 12 Dokumen kejadian kebakaran. Dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran.

### **3) Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota memiliki alokasi anggaran sebesar Rp.

13.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.210.000,- atau terealisasi sebesar 55,46 %.

Target output kegiatan ini adalah operasi penganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah sebanyak 10 kejadian. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100%. Dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota.

#### **4) Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.870.000,- atau terealisasi sebesar 48,70%

## **2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran.**

Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.860.000,- atau terealisasi sebesar 85,73%. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100%. Output kegiatan ini adalah Persentase pengendalian kebakaran yang terkendalikan sebanyak 74 kali Kasus kebakaran dalam jangkauan WMK.

### **1) Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran**

Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.860.000,- atau terealisasi sebesar 85,73%%. Target output kegiatan ini adalah Alat Proteksi Kebakaran yang dinilai sebanyak 20 unit. Dan Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran sebanyak 20 Dokumen. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100 %.

## **3. Investigasi Kejadian Kebakaran**

Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.320.000,- atau terealisasi sebesar 26,40%.

Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100%. Output kegiatan ini adalah Persentase pengendalian kebakaran yang terkendalikan sebanyak 74 kali Kasus kebakaran dalam jangkauan WMK.

### **1) Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran**

Sub Kegiatan Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.320.000,- atau terealisasi sebesar 26,40%. Target output kegiatan ini adalah frekuensi investigasi Alat Kebakaran yang dinilai sebanyak 20 Kali. Dan Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian sebanyak 20 Dokumen. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100%.

#### **4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 20.140.000,- atau terealisasi sebesar 80,56%.

Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi.

##### **1) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran**

Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 20.140.000,- atau terealisasi sebesar 80,56%. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 97%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi sebanyak 30 orang yang terealisasi sebanyak 29 orang. Dan Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya sebanyak 6 Desa/Kelurahan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah menetapkan sebanyak **3** tujuan, **4** sasaran dengan **6** indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik terdiri dari 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian realisasi Anggaran sebesar 88.24%
- Sasaran Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian realisasi anggaran sebesar 97.01%
- Sasaran Meningkatnya Penegakan Perda terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian realisasi anggaran sebesar 97.88%.
- Sasaran Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian realisasi anggaran sebesar 87.53%.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dari analisis capaian kinerja diatas diketahui bahwa 6 (enam) indikator mencapai 100,00% atau baik sekali, walaupun dengan pencapain yang sangat baik, untuk kinerja satuan polisi pamong praja masih perlu ditingkatkan yaitu :

- Meningkatkan pelayanan baik dari segi kualitas pelayanan pengamanan dan kuantitas anggota dan sarana keamanan;
- Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang PERDA / PERKADA dan Pencegahan Kebakaran;

- Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kebutuhan satuan Linmas di setiap RT/sebutan lainnya kepada Kepala desa/lurah dan kepala RW;
- Melakukan sosialisasi tentang pentingnya Perda / Perkada terhadap pelaksanaan ketertiban dan keamanan yang merupakan produk hukum daerah kabupaten bangka tengah;
- Upaya pencegahan kebakaran dalam rangka mengurangi resiko bencana kebakaran;
- Menambah jumlah armada pemadam kebakaran khususnya untuk mobil Supplay Air maupun mobil pemadam kebakaran;
- Menambah Jumlah pos pemadam kebakaran.
- Menambah Jumlah anggota pemadam kebakaran serta meningkatkan kompetensi anggota pemadam kebakaran yang ada.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 12.023.518.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 11.081.824.545,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 92.08% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 92.17%.

Adapun Program – program untuk mencapai Indikator Kinerja sasaran Satpol PP adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah kepada pihak-pihak terkaitbaik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bangka Tengah.

# LAMPIRAN

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDANAAN TAHUN 2021-2026**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**(Matrik Renstra 2021-2016)**

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kinerja	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH ( s-d akhir )		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG – JAWAB
											2021		2022		2023		2024		2025		2026				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2	20	21
												13,590,788,000		9,660,840,000		13,105,732,883		14,494,306,171		14,891,736,788		16,434,910,466		82,178,314,307	
Terwujudnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik								Nilai SAKIP OPD	Kategori Nilai		BB	5,312,438,000	BB	3,655,359,328	BB	5,321,838,483	BB	5,934,022,331	BB	5,977,424,564	A	6,581,167,020	A	32,782,249,725	
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik							Nilai Mutu Kepuasan pelayanan	Nilai		79	5,312,438,000	79	3,655,359,328	79	5,321,838,483	79	5,934,022,331	79	5,977,424,564	79	6,581,167,020	79	32,782,249,725	
		1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Pelayanan OPD Sesuai Tupoksinya	Persen		100%	5,312,438,000	100%	3,655,359,328	100%	5,321,838,483	100%	5,934,022,331	100%	5,977,424,564	100%	6,581,167,020	100%	32,782,249,725	SATPOL PP
		1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan baik dan tepat waktu	Kategori Nilai		BB	40,000,000	BB	40,000,000	BB	60,000,000	BB	62,000,000	BB	62,000,000	A	75,000,000	A	339,000,000	SATPOL PP
		1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	30,000,000	5 Dokumen	30,000,000	5 Dokumen	40,000,000	5 Dokumen	41,000,000	5 Dokumen	41,000,000	5 Dokumen	50,000,000	25 Dokumen	232,000,000	SATPOL PP
		1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	10,000,000	5 Dokumen	10,000,000	5 Laporan	20,000,000	5 Laporan	21,000,000	5 Dokumen	21,000,000	5 Laporan	25,000,000	25 Laporan	107,000,000	SATPOL PP

		1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP	SAP		Sesuai	3,019,788,000	Sesuai	2,890,738,918	Sesuai	3,089,788,000	Sesuai	3,193,788,000	Sesuai	3,199,788,000	Sesuai	3,309,788,000	Sesuai	18,703,678,918	SATPOL PP
		1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3,004,788,000	12 Bulan	2,875,738,918	32 Orang/ 12 Bulan	3,074,788,000	32 Orang/ 12 Bulan	3,174,788,000	32 Orang/ 12 Bulan	3,174,788,000	32 Orang/ 12 Bulan	3,274,788,000	32 Orang/ 60 Bulan	18,579,678,918	SATPOL PP
		1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	7,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	15,000,000	6 Laporan	52,000,000	SATPOL PP
		1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	5,000,000	4 Laporan	10,000,000	4 Laporan	10,000,000	4 Laporan	12,000,000	4 Laporan	15,000,000	4 Laporan	20,000,000	24 Laporan	72,000,000	SATPOL PP
		1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persen		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	SATPOL PP
		1	05	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP
		1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP
		1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		100%	455,110,000	100%	30,000,000	100%	594,347,071	100%	479,505,188	100%	620,000,000	100%	670,000,000	100%	2,848,962,259	SATPOL PP

		1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	259 Stel	355,110,000	-	-	259 Paket	444,347,071	139 Paket	279,505,188	259 Paket	450,000,000	287 Paket	500,000,000	293 Paket	2,028,962,259	SATPOL PP
		1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang/ Kali	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Orang/ Kali	100,000,000	5 Orang/ Kali	30,000,000	10 Orang/ Kali	150,000,000	10 Orang/ Kali	200,000,000	10 Orang/ Kali	170,000,000	10 Orang/ Kali	170,000,000	55 Orang/ Kali	820,000,000	SATPOL PP
		1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang/ Kali	Terlaksananya Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP
		1	05	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>Persen</b>		<b>100%</b>	<b>214,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>166,800,000</b>	<b>100%</b>	<b>232,670,000</b>	<b>100%</b>	<b>247,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>253,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>287,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,400,470,000</b>	<b>SATPOL PP</b>
		1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	3,000,000	12 Bulan	3,000,000	12 Paket	3,630,000	12 Paket	5,000,000	12 Paket	5,000,000	12 Paket	10,000,000	60 Paket	29,630,000	SATPOL PP
		1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	36,000,000	12 Bulan	24,000,000	12 Paket	29,040,000	12 Paket	36,000,000	12 Paket	40,000,000	12 Paket	40,000,000	60 Paket	205,040,000	SATPOL PP
		1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	32,000,000	12 Bulan	32,000,000	12 Paket	32,000,000	12 Paket	35,000,000	12 Paket	37,000,000	12 Paket	40,000,000	60 Paket	208,000,000	SATPOL PP
		1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	14,400,000	12 Bulan	14,400,000	12 Paket	14,400,000	12 Paket	17,000,000	12 Paket	17,000,000	12 Paket	17,000,000	60 Paket	94,200,000	SATPOL PP
		1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	3,600,000	12 Bulan	3,600,000	12 Dokumen	3,600,000	12 Dokumen	4,000,000	12 Dokumen	4,000,000	12 Dokumen	5,000,000	60 Dokumen	23,800,000	SATPOL PP
		1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49 Orang/ Kali	125,000,000	30 Orang/ Kali	89,800,000	30 Laporan	150,000,000	30 Laporan	150,000,000	30 Laporan	150,000,000	30 Laporan	175,000,000	199 Laporan	839,800,000	SATPOL PP

		1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		100%	993,930,000	100%	-	100%	616,658,900	100%	1,135,000,000	100%	979,278,126	100%	1,280,000,000	100%	5,004,867,026	SATPOL PP
		1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit	855,840,000	2 unit	-	1 unit	450,000,000	2 unit	970,000,000	12 unit	750,000,000	2 unit	900,000,000	3 unit	3,925,840,000	SATPOL PP
		1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Tersedianya Mebel	1 Item	33,000,000	-	-	1 Paket	40,000,000	-	-	1 Paket	60,000,000	1 Paket	80,000,000	2 Paket	213,000,000	SATPOL PP
		1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Item	50,000,000	1 Item	-	1 Unit	60,000,000	1 Unit	90,000,000	1 Unit	35,000,000	1 Unit	100,000,000	5 Unit	335,000,000	SATPOL PP
		1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	55,090,000	1 Paket	-	1 Unit	66,658,900	1 Unit	75,000,000	1 Unit	134,278,126	1 Unit	200,000,000	5 Unit	531,027,026	SATPOL PP
		1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		100%	309,552,000	100%	300,992,000	100%	399,880,200	100%	456,836,200	100%	456,836,200	100%	456,836,200	100%	2,380,932,800	SATPOL PP
		1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	76,300,000	12 Bulan	152,410,000	12 Laporan	155,200,000	12 Laporan	207,800,000	12 Laporan	207,800,000	12 Laporan	207,800,000	60 Laporan	1,007,310,000	SATPOL PP
		1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	43,200,000	12 Bulan	36,000,000	12 Laporan	43,560,000	12 Laporan	47,916,000	12 Laporan	47,916,000	12 Laporan	47,916,000	60 Laporan	266,508,000	SATPOL PP
		1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	190,052,000	12 Bulan	112,582,000	12 Laporan	201,120,200	12 Laporan	201,120,200	12 Laporan	201,120,200	12 Laporan	201,120,200	60 Laporan	1,107,114,800	SATPOL PP
		1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persen		100%	280,058,000	100%	226,828,410	100%	328,494,312	100%	359,892,943	100%	406,522,238	100%	502,542,820	100%	2,104,338,722	SATPOL PP

								pemerintah n daerah																	
		1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 Unit	69,550,000	9 Unit	69,550,000	9 Unit	84,155,500	9 Unit	92,571,050	9 Unit	101,828,155	9 Unit	150,000,000	45 Unit	567,654,705	SATPOL PP
		1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	142,280,000	12 bulan	129,017,200	28 Unit	156,110,812	29 Unit	171,721,893	29 Unit	188,894,083	29 Unit	188,894,083	171 Unit	976,918,070	SATPOL PP
		1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13 Item	30,600,000	13 Item	20,000,000	13 Unit	30,600,000	13 Unit	35,600,000	13 Unit	35,800,000	13 Unit	55,000,000	65 Unit	207,600,000	SATPOL PP
		1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	73 M2	37,628,000	73 M2	8,261,210	1 Unit (401 M2)	57,628,000	1 Unit (401 M2)	60,000,000	1 Unit (401 M2)	80,000,000	1 Unit (401 M2)	108,648,737	6 Unit (2005 M2)	352,165,947	SATPOL PP
Terwujudnya ketertiban dan Keamanan yang kondusif								Tingkat penyelesaian K3	Persen		100 %	7,044,330,000	100 %	5,089,111,844	100 %	6,425,016,000	100 %	7,065,517,600	100 %	7,270,069,360	100 %	8,045,076,296	100 %	40,939,121,100	SATPOL PP
	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat							Tingkat penyelesaian K3	Persen		100 %	7,044,330,000	100%	5,089,111,844	100%	6,425,016,000	100%	7,065,517,600	100%	7,270,069,360	100%	8,045,076,296	100%	40,939,121,100	SATPOL PP
		1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen		100%	7,044,330,000	100%	5,089,111,844	100%	6,425,016,000	100%	7,065,517,600	100%	7,270,069,360	100%	8,045,076,296	100%	40,939,121,100	SATPOL PP
		1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen		100%	1,996,205,000	100%	1,263,866,844	100%	1,644,283,522	100%	1,947,429,882	100%	2,051,996,360	100.0 0%	2,484,648,536	100%	11,388,430,144	SATPOL PP



		1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	850 orang, 6 Kecamatan	40,000,000	850 orang, 6 Kecamatan	70,000,000	6 Dokumen	65,000,000	6 Dokumen	85,000,000	850 orang 6 Kecamatan	85,000,000	6 Dokumen	150,000,000	36 Dokumen	495,000,000	SATPOL PP
		1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketertiban dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban Umum		Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban Umum	422 orang 22 orang 129 orang	852,200,000	422 orang-129 orang	789,280,000	516 Dokumen	844,350,000	516 Dokumen	875,000,000	516 Dokumen	875,000,000	516 Dokumen	925,000,000	3096 Dokumen	5,160,830,000	SATPOL PP
		1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	422 orang 60 orang 4 orang 154 orang	94,000,000	422 orang 60 orang 4 orang 154 orang	30,060,000	640 Orang	45,000,000	640 Orang	150,000,000	640 Orang	150,000,000	640 Orang	150,000,000	3,840 Orang	619,060,000	SATPOL PP
		1	05	02	2.01	06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	3 Lembaga	40,000,000	3 Lembaga	50,000,000	3 Dokumen	40,000,000	3 Dokumen	111,996,360	3 Dokumen	111,996,360	3 Dokumen	250,000,000	18 Dokumen	603,992,720	SATPOL PP
		1	05	02	2.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	125,000,000	SATPOL PP

		1	05	02	2.01	15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengam Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	3 objek 60 kali 100 kali 3 kegiatan	740,505,000	3 objek 20 kali 40 kali 3 kegiatan	208,305,000	122 Laporan	355,433,522	122 Laporan	395,433,522	122 Laporan	450,000,000	122 Laporan	549,648,536	732 Laporan	2,699,325,580	SATPOL PP
		1	05	02	2.01	16	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	100 kali 24 kali	229,500,000	100 kali 24 kali	116,221,844	122 Laporan	229,500,000	122 Laporan	250,000,000	122 Laporan	300,000,000	122 Laporan	350,000,000	732 Laporan	1,475,221,844	SATPOL PP

		1	05	02	2.01	17	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Perturan kepala daerah (Perkada)	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani, Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	-	-	2 Orang	-	3 Laporan	40,000,000	2 Laporan	50,000,000	4 Laporan	50,000,000	5 Laporan	70,000,000	16 Laporan	210,000,000	SATPOL PP
	Meningkatnya penegakan perda							Persentase Penegakan PERDA	Persen		100%	5,007,885,000	100%	3,810,245,000	100%	4,750,492,478	100%	5,075,442,478	100%	5,175,427,760	100%	5,460,427,760	100%	29,279,920,476	SATPOL PP
		1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen		100%	5,007,885,000	100%	3,810,245,000	100%	4,750,492,478	100%	5,075,442,478	100%	5,175,427,760	100%	5,460,427,760	100%	29,279,920,476	SATPOL PP
		1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Laporan	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6 Perda	50,000,000	6 Perda	25,550,000	6 Laporan	35,000,000	6 Laporan	45,000,000	6 Laporan	50,000,000	6 Laporan	65,000,000	30 Laporan	270,550,000	SATPOL PP
		1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	Terlaksananya Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	154 orang 5 Perda	4,842,835,000	160 orang 5 Perda	3,742,295,000	162 Laporan	4,645,442,478	162 Laporan	4,945,442,478	162 Laporan	5,040,427,760	162 Laporan	5,300,427,760	972 Laporan	28,516,870,476	SATPOL PP
		1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani	Laporan	Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1 Sanksi 24 kali 4 kali	115,050,000	2 Sanksi 24 kali 4 kali	42,400,000	5 Sanksi 28 Laporan	70,050,000	7 Sanksi 28 Laporan	85,000,000	9 Sanksi 28 Laporan	85,000,000	10 Sanksi 28 Laporan	95,000,000	34 Sanksi 168 Laporan	492,500,000	SATPOL PP

								Sesuai SOP																	
		1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	Persen		100%	40,240,000	100%	15,000,000	100%	30,240,000	100%	42,645,240	100%	42,645,240	100%	100,000,000	100%	270,770,480	SATPOL PP
		1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	Terlaksananya a Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	6 Kali	40,240,000	6 Kali	15,000,000	6 Laporan	30,240,000	6 Laporan	42,645,240	6 Laporan	42,645,240	6 Laporan	100,000,000	36 Laporan	270,770,480	SATPOL PP
Terwujudnya Penanggulang an Kebakaran yang handal dan efektif								Persentase peningkatan respon penanganan kebakaran	Persen		85%	1,234,020,000	85%	916,368,828	85%	1,358,878,400	85%	1,494,766,240	85%	1,644,242,864	85%	1,808,667,150	100%	8,456,943,482	SATPOL PP
	Meningkatnya Penanggulang an kebakaran Secara Dini dan Komprehensif							Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen		85%	1,234,020,000	85%	916,368,828	85%	1,358,878,400	85%	1,494,766,240	85%	1,644,242,864	85%	1,808,667,150	85%	8,456,943,482	SATPOL PP
		1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kab/Kota	Persen		85%	1,234,020,000	85%	916,368,828	85%	1,358,878,400	85%	1,494,766,240	85%	1,644,242,864	85%	1,808,667,150	85%	8,456,943,482	SATPOL PP
		1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kab/Kota	Persen		100%	1,159,020,000	100%	856,368,828	100%	1,268,878,400	100%	1,344,766,240	100%	1,514,242,864	100%	1,570,242,864	100%	7,713,519,196	SATPOL PP
		1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulang an Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	63 titik	20,000,000	63 titik	15,000,000	63 Dokumen	25,000,000	63 Dokumen	25,000,000	63 Dokumen	40,000,000	63 Dokumen	50,000,000	378 Dokumen	175,000,000	SATPOL PP

		1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit 36 Orang 7 Orang 70 kali	1,104,020,000	3 Unit 38 Orang 7 Orang 70 kali	811,368,828	70 Laporan	1,166,620,000	70 Laporan	1,166,620,000	70 Laporan	1,299,242,864	70 Laporan	1,335,242,864	420 Laporan	6,883,114,556	SATPOL PP
		1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan /Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan /Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	30 Kejadian	20,000,000	30 Kejadian	15,000,000	30 Dokumen	42,258,400	30 Dokumen	43,146,240	30 Dokumen	60,000,000	30 Dokumen	60,000,000	180 Dokumen	240,404,640	SATPOL PP
		1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Kejadian	15,000,000	12 Kejadian	15,000,000	12 Dokumen	15,000,000	12 Dokumen	15,000,000	12 Dokumen	15,000,000	12 Dokumen	25,000,000	72 Dokumen	100,000,000	SATPOL PP
		1	05	04	2.01	17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 Paket	-	-	-	-	-	1 Unit	75,000,000	1 Unit	75,000,000	1 Unit	75,000,000	3 Unit	225,000,000	SATPOL PP

		1	05	04	2.01	18	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	-	-	3 PKS/M OU/KO ORDIN ASI	-	5 Dokum en	20,000,000	5 Dokum en	20,000,000	5 Dokum en	25,000,000	5 Dokum en	25,000,000	23 Dokum en	90,000,000	SATPOL PP
		1	05	04	2.02		<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>Persentase Pengendalian Kebakaran</b>	<b>Persen</b>		100%	35,000,000	100%	30,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	40,000,000	100%	210,000,000	SATPOL PP
		1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	20 Badan Usaha/I nstanas i/Pelak u Usaha	20,000,000	20 Badan Usaha/I nstanas i/Pelak u Usaha	15,000,000	20 Dokum en	20,000,000	20 Dokum en	20,000,000	20 Dokum en	20,000,000	20 Dokum en	20,000,000	120 Dokum en	115,000,000	SATPOL PP
		1	05	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	20 Unit	15,000,000	20 Unit	15,000,000	20 Dokum en	15,000,000	20 Dokum en	15,000,000	20 Dokum en	15,000,000	20 Dokum en	20,000,000	120 Dokum en	95,000,000	SATPOL PP
		1	05	04	2.03		<b>Investigasi Kejadian Kebakaran</b>	<b>Persentase pengendalian kebakaran</b>	<b>Persen</b>		100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	90,000,000	SATPOL PP
		1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Dokumen	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	70 Kali	15,000,000	20 Kali	15,000,000	20 Dokum en	15,000,000	20 Dokum en	15,000,000	20 Dokum en	15,000,000	20 Dokum en	15,000,000	170 Dokum en	90,000,000	SATPOL PP

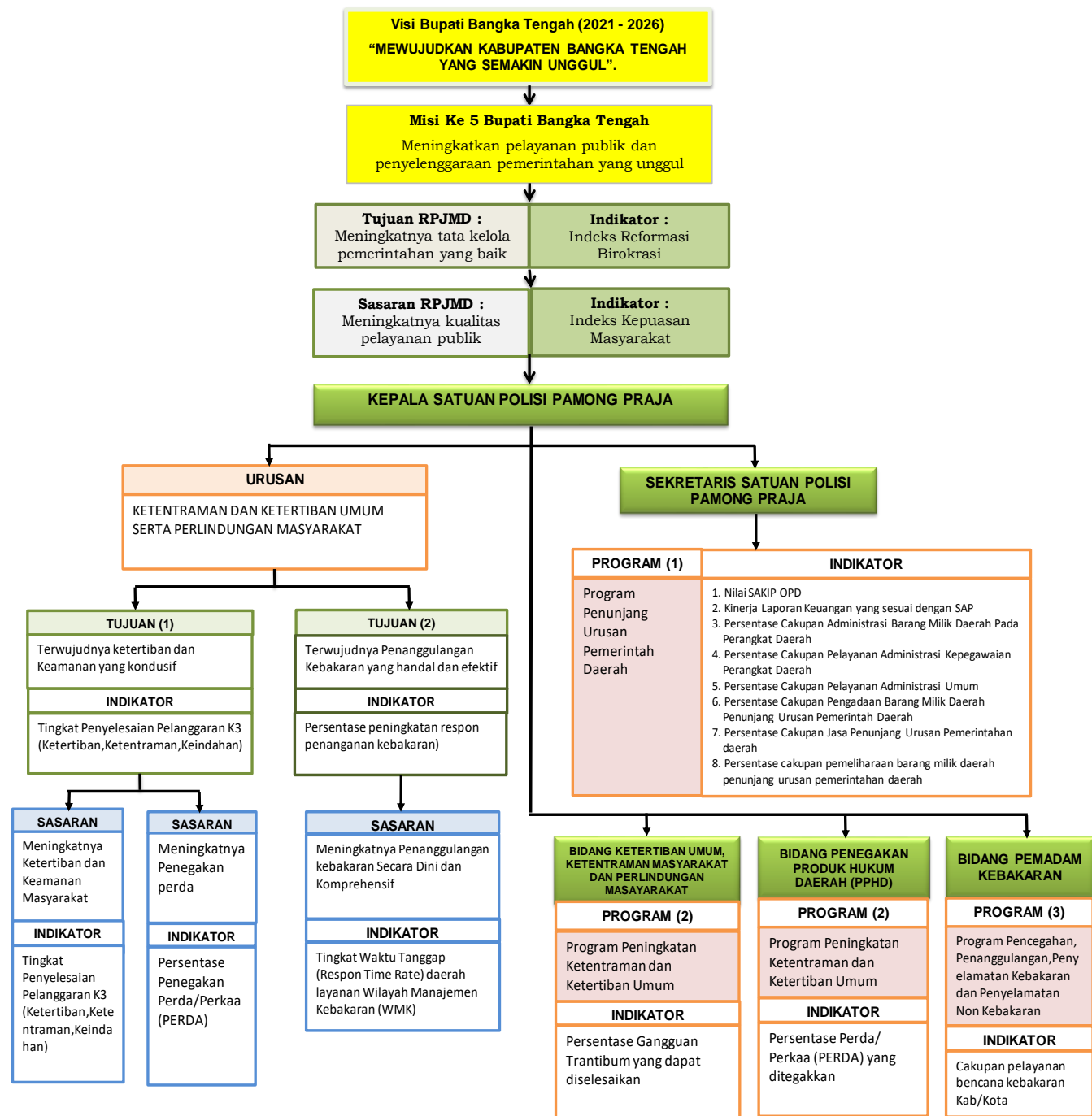
		1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pengendalian kebakaran	Persen		100%	25,000,000	100%	15,000,000	100%	40,000,000	100%	100,000,000	100%	80,000,000	100%	183,424,286	100%	443,424,286	SATPOL PP
		1	05	04	2.04	01		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan an Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan an Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	3 kali	25,000,000	3 kali	15,000,000	30 Orang	25,000,000	30 Orang	25,000,000	30 Orang	30,000,000	30 Orang	30,000,000	180 Orang	150,000,000	SATPOL PP
		1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/ Kelurahan	Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	-	-	6 kali	-	6 Desa/ Kelurahan	15,000,000	6 Desa/ Kelurahan	15,000,000	6 Desa/ Kelurahan	50,000,000	6 Desa/ Kelurahan	78,424,286	6 Desa/ 30 Kali	158,424,286	SATPOL PP
		1	05	04	2.04	03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Dokumen	Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana	-	-	-	-	38 Dokumen	-	38 Dokumen	60,000,000	-	-	38 Dokumen	75,000,000	114 Dokumen	135,000,000	SATPOL PP



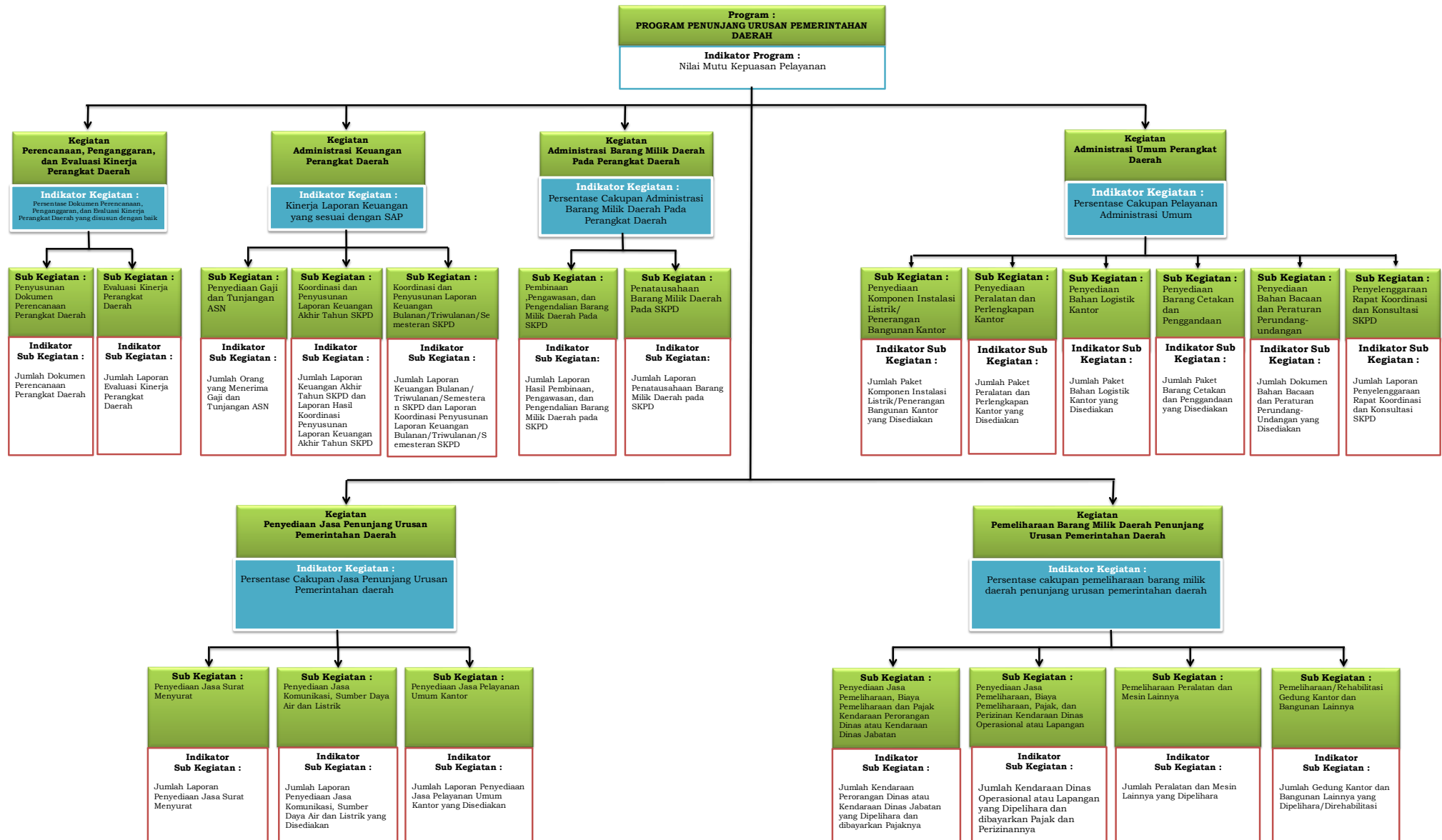
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

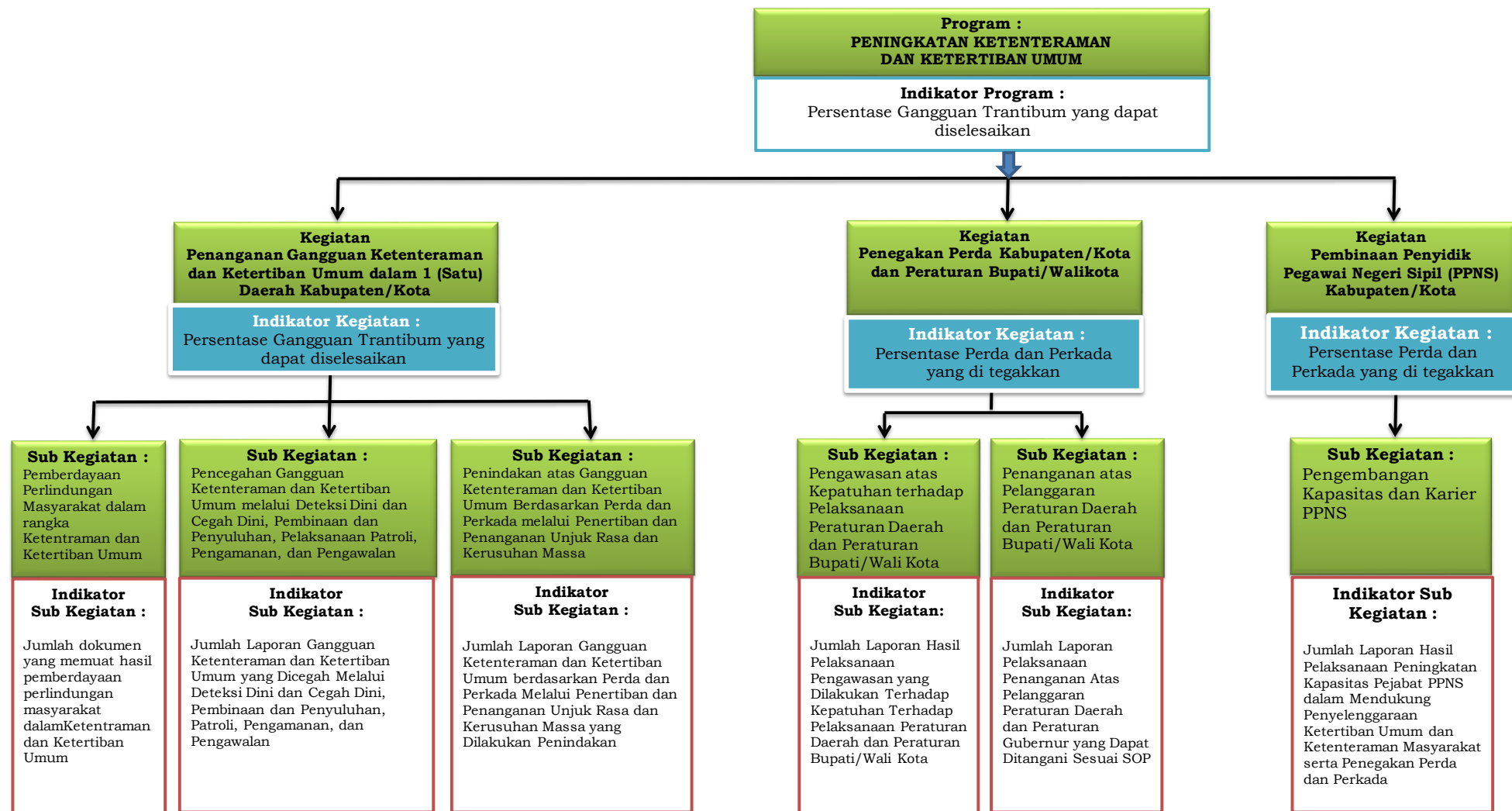
Dr. Roy Haris Oktabian, S.STP, M.Si  
Pembina Tk.I/ IV b  
NIP198210022002121002

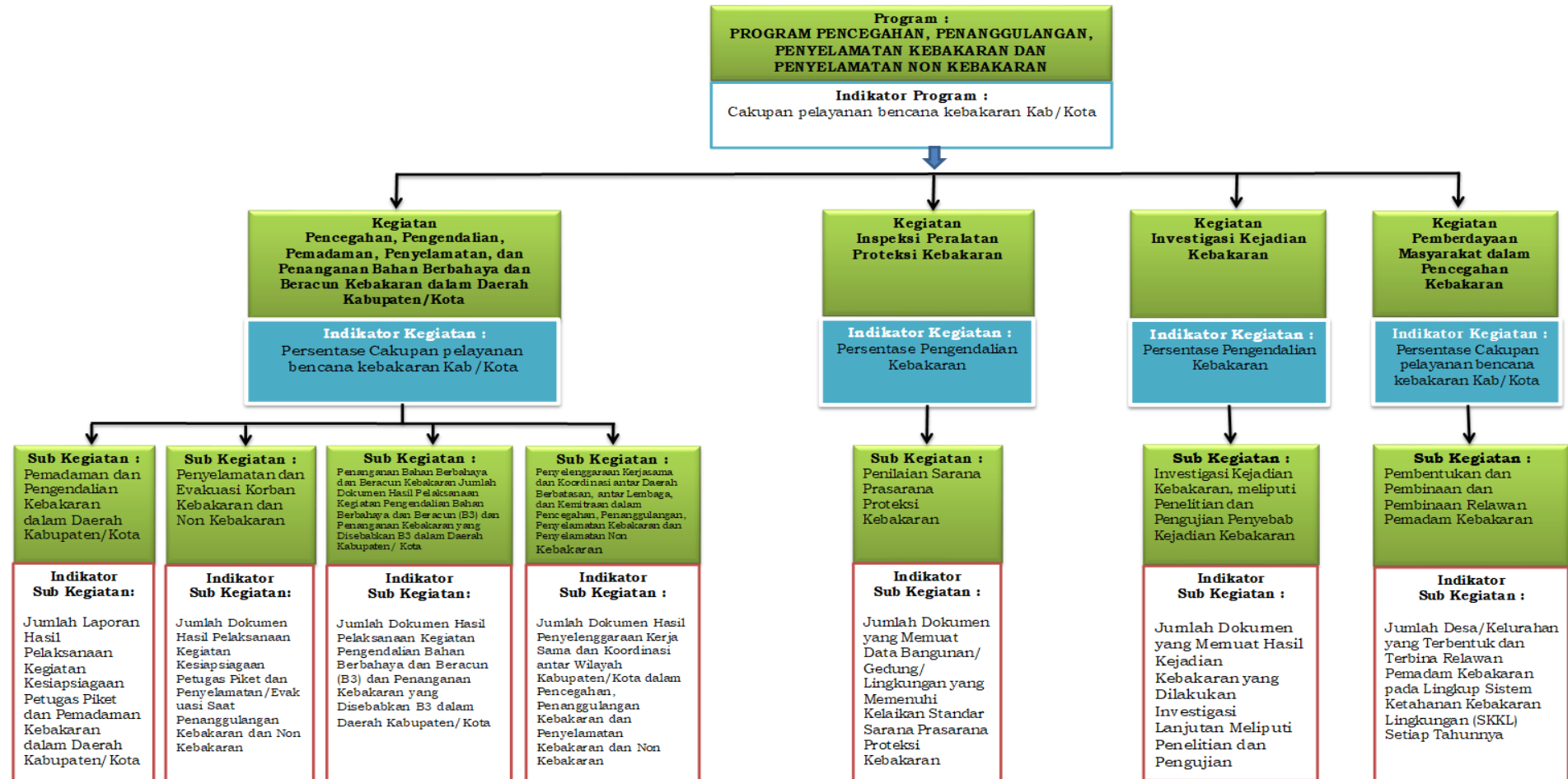
CASCADING KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN 2024







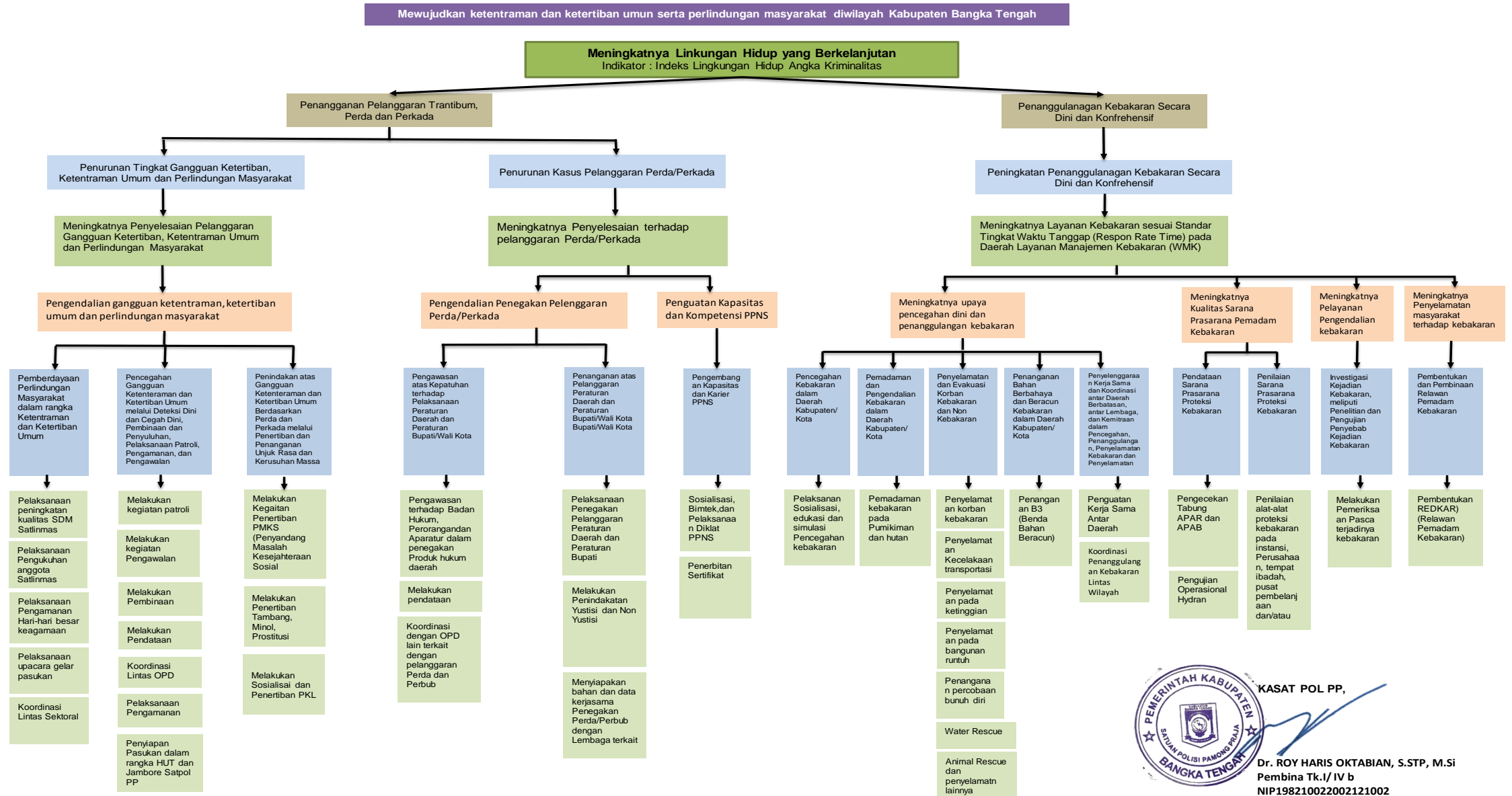




KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Dr. ROY HARIS OKTABIAN, S.STP, M.Si  
Pembina Tk.I/ IV b  
NIP198210022002121002

**POHON KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN 2024**





# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa No. 02 Koba – Bangka Tengah  
Kode Pos. 33681 Email : satpolpp.bateng@gmail.com

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Roy Haris Oktabian, S.STP, M.Si**

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Algafry Rahman, ST**

Jabatan : Bupati Bangka Tengah

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, 21 Maret 2024

Pihak Kedua,



**Algafry Rahman, S.T**

Pihak Pertama,



**Dr. Roy Haris Oktabian, S.STP, M.Si**  
Pembina Tk.I/ IV b  
NIP198210022002121002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
(ESELON II)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Tingkat penyelesaian K3 (Ketertiban, Kententraman dan Keindahan)		100%
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		100%
2	Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		85%
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	1	Nilai Mutu Kepuasan pelayanan	89
		2	Nilai Evaluasi SAKIP	BB
		3	Kinerja Laporan Keuangan	SESUAI

Program		Anggaran		Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp	6,318,410,000	APBD
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan ketertiban Umum	Rp	4,893,968,000	APBD
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan penyelamatan Non Kebakaran	Rp	959,140,000	APBD
Total anggaran		Rp	12,171,518,000	

Koba, 21 Maret 2024

BUPATI BANGKA TENGAH,



ALGAFRY RAHMAN, ST

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,



Dr. ROY HARIS OKTABIAN, S.STP, M.Si  
Pembina Tk.I/ IV b  
NIP198210022002121002



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa No. 02 Koba – Bangka Tengah  
Kode Pos. 33681 Email : satpolpp.bateng@gmail.com

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Sirajuddin, S.AP**  
Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dr. Roy Haris Oktabian, S.STP, M.Si**  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Koba, 21 Maret 2024**

**Pihak Kedua,**



**Dr. Roy Haris Oktabian, S.STP, M.Si**  
Pembina Tk.I/ IV b  
NIP198210022002121002

**Pihak Pertama,**

**Sirajuddin, S.AP**  
Pembina Tk.I/ IV b  
NIP197904282002121006



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
(ESELON III a / SEKRETARIS )

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
I	Indeks Pelayanan OPD Sesuai Tupoksinya	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100	%
	1 Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai Mutu Kepuasan Pelayanan	89	
		Nilai Evaluasi SAKIP	BB	
		Kinerja Laporan Keuangan	SESUAI	

Program		Anggaran	Keterangan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp 6,318,410,000	APBD
Kegiatan			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 20,000,000	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5,267,000,000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp 10,000,000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 25,000,000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 149,200,000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 241,080,000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 606,130,000	
Total anggaran		Rp 6,318,410,000	

Koba, 21 Maret 2024  
SEKRETARIS,

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Dr. ROY HARIS OKTABIAN, S.STP, M.Si  
Pembina Tk.I/ IV b  
NIP198210022002121002

SIRAJUDDIN, S.AP  
Pembina Tk.I/ IV b  
NIP197904282002121006





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa No. 02 Koba – Bangka Tengah  
Kode Pos. 33681 Email : satpolpp.bateng@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Primadoni, SE**  
Jabatan : Kepala Bidang Ketertiban umum, Ketentraman Masyarakat  
dan Perlindungan Masyarakat

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dr. Roy Haris Oktabian, S.STP, M.Si**  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Koba, 21 Maret 2024**

**Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama,**



**Dr. Roy Haris Oktabian, S.STP, M.Si**  
**Pembina Tk.I/ IV b**  
**NIP198210022002121002**

**Primadoni, SE**  
**Pembina/ IV a**  
**NIP197804022006041003**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
( ESELON III b / KABID KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT )

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Pogram		Target	
(1)	(2)	(3)		(4)	
1	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	1	Persentase Penanganan Gangguan K3 (Ketertiban, Kententrman dan Keindahan) yang dapat diselesaikan	100%	
Program				Anggaran	Keterangan
II	Program Peningkatan Ketenteraman Dan ketertiban Umum			Rp 225,000,000	APBD
Kegiatan					
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Rp 225,000,000	APBD
Total anggaran				Rp 225,000,000	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,



Dr. ROY HARIS OKTABIAN, S.STP, M.Si  
Pembina Tk.I/ IV b  
NIP198210022002121002

Koba, 21 Maret 2024

KABID KETERTIBAN UMUM,  
KETENTRAMAN MASYARAKAT  
DAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT,

PRIMADONI, SE  
Pembina / IV a  
NIP197804022006041003



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa No. 02 Koba – Bangka Tengah  
Kode Pos. 33681 Email : satpolpp.bateng@gmail.com

## PERJANJIAN KINERJA

### TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Sama Anam, S.Mn**

Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dr. Roy Haris Oktabian, S.STP, M.Si**

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Koba, 21 Maret 2024

Pihak Pertama,



**Dr. Roy Haris Oktabian, S.STP, M.Si**  
Pembina Tk.I/ IV b  
NIP198210022002121002

**Sama Anam, S.Mn**  
Penata Tk.I/ III d  
NIP198308132005011004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
( ESELON III b / KABID PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH )

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Target	
(1)	(2)	(3)		(4)	
1	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	1	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	100%	
Program				Anggaran	Keterangan
II	Program Peningkatan Ketenteraman Dan ketertiban Umum			Rp 4,693,968,000	APBD
Kegiatan					
1	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			Rp 25,000,000	APBD
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota,			Rp 4,643,968,000	
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota (Bidang PPHD)			Rp 25,000,000	
Total anggaran				Rp 4,693,968,000	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,



Dr. ROY HARIS OKTABIAN, S.STP, M.Si  
Pembina Tk.I/ IV b  
NIP198210022002121002

Koba, 21 Maret 2024

KABID PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH,

SAMA ANAM, S.Mn  
Penata Tk.I/ III d  
NIP198308132005011004



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa No. 02 Koba – Bangka Tengah  
Kode Pos. 33681 Email : satpolpp.bateng@gmail.com

## PERJANJIAN KINERJA

### TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Arry Purnama, S.IP**  
Jabatan : Kepala Bidang Pemadam Kebakaran  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dr. Roy Haris Oktabian, S.STP, M.Si**  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, 21 Maret 2024  
Pihak Pertama,

Arry Purnama, S.IP  
Pembina / IV a  
NIP197804262005011004

Pihak Kedua,

Dr. Roy Haris Oktabian, S.STP, M.Si  
Pembina Tk.I/ IV b  
NIP198210022002121002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
( ESELON III b / KABID PEMADAM KEBAKARAN )

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Target	
(1)	(2)	(3)		(4)	
1	Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif	1	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	85%	
Program				Anggaran	Keterangan
1	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan penyelamatan Non Kebakaran			Rp 959,140,000	APBD
Kegiatan				Anggaran	Keterangan
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			Rp 904,140,000	
2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			Rp 15,000,000	
3	Investigasi Kejadian Kebakaran			Rp 15,000,000	
4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			Rp 25,000,000	
	Total anggaran			Rp 959,140,000	

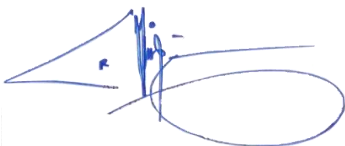
Koba, 21 Maret 2024

KABID PEMADAM KEBAKARAN,

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,



Dr. ROY HARIS OKTABIAN, S.STP, M.Si  
Pembina Tk.I/ IV b  
NIP198210022002121002



ARRY PURNAMA, S.I.P  
Pembina / IV a  
NIP197804262005011004



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa No. 02 Koba – Bangka Tengah  
Kode Pos. 33681 Email : satpolpp.bateng@gmail.com

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Noviani, S.AP**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Sirajuddin, S.AP**

Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Koba, 21 Maret 2024**

**Pihak Kedua,**

**Sirajuddin, S.AP**  
Pembina Tk.I/ IV b  
NIP197904282002121006

**Pihak Pertama,**

**Noviani, S.AP**  
Penata / III c  
NIP198811292011012003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
(ESELON IV a / KASUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN )

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target	
(1)	(2)	(3)		(4)	
1	Kelancaran administrasi Keuangan	1	Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP	SAP	Sesuai
2	Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	2	Persentase Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100	Persen
3	Kelancaran Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen
4	Kelancaran administrasi Umum Perangkat Daerah	4	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100	Persen
5	Kelancaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	Persentase Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100	Persen
6	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	6	Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100	Persen
Kegiatan dan Sub Kegiatan				Anggaran	Keterangan
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp5,267,000,000	APBD
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Rp 5,257,000,000	
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Rp 5,000,000	
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			Rp 5,000,000	
2	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			Rp 10,000,000	APBD
a	Pembinaan ,Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD			Rp 5,000,000	
b	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD			Rp 5,000,000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp 25,000,000	APBD
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Rp 25,000,000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp 149,200,000	APBD
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Rp 5,000,000	
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Rp 18,000,000	
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Rp 15,000,000	
d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Rp 10,000,000	
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Rp 1,200,000	
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Rp 100,000,000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp 241,080,000	APBD
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Rp 84,290,000	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Rp 36,000,000	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Rp 120,790,000	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp 606,130,000	APBD
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Rp 70,410,000	
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Rp 505,720,000	
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Rp 20,000,000	
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Rp 10,000,000	
	Total anggaran			Rp6,298,410,000	

Koba, 21 Maret 2024

SEKRETARIS,



SIRAJUDDIN, S.AP  
Pembina Tk.I/ IV b  
NIP197904282002121006

KASUBBAG UMUM,  
KEPEGAWAIAN DAN  
KEUANGAN,



NOVIANI, S. AP  
Penata / III c  
NIP198811292011012003





# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa No. 02 Koba – Bangka Tengah  
Kode Pos. 33681 Email : satpolpp.bateng@gmail.com

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Kustina, A.Md**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Sirajuddin, S.AP**

Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Koba, 21 Maret 2024**

**Pihak Kedua,**

**Sirajuddin, S.AP**  
**Pembina Tk.I/ IV b**  
**NIP197904282002121006**

**Pihak Pertama,**

**Kustina, A.Md**  
**Penata / III c**  
**NIP197301302006042006**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
(ESELON IV a / KASUBBAG PERENCANAAN )

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target	
(1)	(2)	(3)		(4)	
1	Ketepatan Waktu dalam penyampaian laporan/dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen
		2	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan
Kegiatan				Anggaran	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp 20,000,000	APBD
Sub Kegiatan					
a	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat daerah			Rp 15,000,000	APBD
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp 5,000,000	
	Total anggaran			Rp 20,000,000	

SEKRETARIS SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA.



SIRAJUDDIN, S.AP  
Pembina Tk.I/ IV b  
NIP197904282002121006

Koba, 21 Maret 2024

KASUBBAG PERENCANAAN,



KUSTINA, A.Md  
Penata / III c  
NIP197301302006042006



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa No. 02 Koba – Bangka Tengah  
Kode Pos. 33681 Email : satpolpp.bateng@gmail.com

## PERJANJIAN KINERJA

### TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Muji Santoso, S.IP**

Jabatan : Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Prasarana

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Primadoni, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Ketertiban umum, Ketentraman Masyarakat  
dan Perlindungan Masyarakat

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Koba, 21 Maret 2024**

**Pihak Kedua,**

**Primadoni, SE**  
Pembina/ IV a  
NIP197804022006041003

**Pihak Pertama,**

**Muji Santoso, S.IP**  
Penata Tk. I / III d  
NIP198407122006041011

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
(ESELON IV a /KASI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN PRASARANA )

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	
(1)	(2)	(3)		(4)	
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	1	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan)	60	Laporan
		2	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	30	Laporan
Kegiatan				Anggaran	Keterangan
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.			Rp 190,000,000	APBD
Sub Kegiatan					
a	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			Rp 150,000,000	APBD
b	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			Rp 40,000,000	
	Total anggaran			Rp 190,000,000	

KABID KETERTIBAN UMUM,  
KETENTRAMAN MASYARAKAT  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT,



PRIMADONI, SE  
Pembina / IV a  
NIP197804022006041003

Koba, 21 Maret 2024  
KASI OPERASI DAN  
PENGENDALIAN PRASARANA,



MUJI SANTOSO, S.IP  
Penata Tk. I / III d  
NIP198407122006041011



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa No. 02 Koba – Bangka Tengah  
Kode Pos. 33681 Email : satpolpp.bateng@gmail.com

## PERJANJIAN KINERJA

### TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Ericson Ricardo, A.Md**  
Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Primadoni, SE**  
Jabatan : Kepala Bidang Ketertiban umum, Ketentraman Masyarakat  
dan Perlindungan Masyarakat

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Koba, 21 Maret 2024**

**Pihak Kedua,**

**Primadoni, SE**  
Pembina/ IV a  
NIP197804022006041003

**Pihak Pertama,**

**Ericson Ricardo, A.Md**  
Penata Muda TK. I / III b  
NIP198203262005011004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
(ESELON IV a / KASI PERLINDUNGAN MASYARAKAT )

No.	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	Dokumen
Kegiatan			Anggaran	Keterangan
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp 35,000,000	APBD
Sub Kegiatan				
a	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		Rp 35,000,000	APBD
			Rp 35,000,000	

KABID KETERTIBAN UMUM,  
KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT,



PRIMADONI, SE  
Pembina / IV a  
NIP197804022006041003

Koba, 21 Maret 2024

KASI PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT,



ERICSON RICARDO, A.Md  
Penata Muda TK. I / III b  
NIP198203262005011004



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa No. 02 Koba – Bangka Tengah  
Kode Pos. 33681 Email : satpolpp.bateng@gmail.com

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Efa Nurpajriyanti, SH**  
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan Dan Pengawasan  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Sama Anam, S.Mn**  
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah  
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Koba, 21 Maret 2024**

**Pihak Kedua,**

**Sama Anam, S.Mn**  
Penata Tk.I / III d  
NIP198308132005011004

**Pihak Pertama,**

**Efa Nurpajriyanti, SE**  
Penata Tk. I / III d  
NIP198112072010012007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
(ESELON IV a /KASI PEMBINAAN, PENYULUHAN DAN PENGAWASAN )

No.	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	
(2)	(1)	(3)		(4)	
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12	Laporan
		2	Jumlah anggota SATPOLP PP yang tersedia sebagai Tenaga Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	154	Orang
Kegiatan				Anggaran	Keterangan
1	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			Rp 4,618,968,000	APBD
Sub Kegiatan				Anggaran	Keterangan
a	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			Rp 4,618,968,000	
	Total anggaran			Rp 4,618,968,000	

Koba, 21 Maret 2024

KABID PENEGAKAN PRODUK  
HUKUM DAERAH,



SAMA ANAM, S.Mn  
Penata Tk.I / III d  
NIP198308132005011004

KASI PEMBINAAN  
PENYULUHAN DAN  
PENGAWASAN,



EFA NURPAJRIYANTI, SH  
Penata Tk. I / III d  
NIP198112072010012007





# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa No. 02 Koba – Bangka Tengah  
Kode Pos. 33681 Email : satpolpp.bateng@gmail.com

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Sapril, S.IP**  
Jabatan : Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Sama Anam, S.Mn**  
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah  
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Koba, 21 Maret 2024**

**Pihak Kedua,**

**Sama Anam, S.Mn**  
Penata Tk.I / III d  
NIP198308132005011004

**Pihak Pertama,**

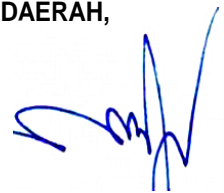
**Sapril, S.IP**  
Penata / III c  
NIP197809102004011018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
(ESELON IV a /KASI KASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN )

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target	
(1)		(2)		(3)	
1	Terlaksananya penindakan yustisi dan Penyelidikan pelanggaran PERDA/ PERKADA serta Kebijakan Pemerintah Daerah	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12	Laporan
2	Meningkatnya Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	2	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	6	Laporan
Kegiatan				Anggaran	Keterangan
1	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			Rp 25,000,000	APBD
a	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			Rp 25,000,000	
2	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			Rp 25,000,000	APBD
a	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			Rp 25,000,000	
	Total anggaran			Rp 50,000,000	

KABID PENEGAKAN PRODUK HUKUM  
DAERAH,



SAMA ANAM, S.Mn  
Penata Tk.I/ III d  
NIP198308132005011004

Koba, 21 Maret 2024

KASI PENYELIDIKAN DAN  
PENYIDIKAN,



SAPRIL, S.I.P  
Penata / III c  
NIP197809102004041018



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa No. 02 Koba – Bangka Tengah  
Kode Pos. 33681 Email : satpolpp.bateng@gmail.com

## PERJANJIAN KINERJA

### TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Imran, S.IP**

Jabatan : Kapala Seksi Operasi dan Penyelamatan Kebakaran

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Arry Purnama, S.IP**

Jabatan : Kepala Bidang Pemadam Kebakaran

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**Arry Purnama, S.IP**  
**Pembina / IV a**  
**NIP197804262005011004**

**Koba, 21 Maret 2024**

Pihak Pertama,

**Imran, S.IP**  
**Penata / III c**  
**NIP197908162006041008**

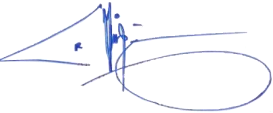
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
( ESELON IV a / KASI OPERASI DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN )

No.	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	Laporan
2	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12	Dokumen
3	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	Dokumen
4	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	12	Dokumen
5	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya.	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	30	Orang

Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 904,140,000	APBD
Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
a	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 849,140,000	APBD
b	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Rp 20,000,000	
c	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 15,000,000	
d	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 20,000,000	
Total anggaran		Rp 904,140,000	

KABID PEMADAM KEBAKARAN,



ARRY PURNAMA, S.I.P  
Pembina / IV a  
NIP197804262005011004

Koba, 21 Maret 2024

KASI OPERASI DAN  
PENYELAMATAN KEBAKARAN,



IMRAN, S.IP  
Penata / III c  
NIP197908162006041008



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa No. 02 Koba – Bangka Tengah  
Kode Pos. 33681 Email : satpolpp.bateng@gmail.com

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Yasir Arafat, S.S**  
Jabatan : Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Arry Purnama, S.IP**  
Jabatan : Kepala Bidang Pemadam Kebakaran  
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**Arry Purnama, S.IP**  
Pembina / IV a  
NIP197804262005011004

Koba, 21 Maret 2024  
Pihak Pertama,

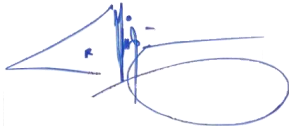
**Yasir Arafat, S.S**  
Penata / III c  
NIP198002022006041020

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
(ESELON IV a / KASI PENCEGAHAN KEBAKARAN )

No.	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	
(1)	(2)	(3)		(4)	
1	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran.	1	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	20	Dokumen
2	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran.	2	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	20	Dokumen
3	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya.	3	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	30	Orang
Kegiatan				Anggaran	Keterangan
1	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			Rp 15,000,000	APBD
a	Meliputi Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran dan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			Rp 15,000,000	
2	Investigasi Kejadian Kebakaran			Rp 15,000,000	APBD
a	Meliputi Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran			Rp 15,000,000	
3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			Rp 25,000,000	APBD
a	Meliputi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat			Rp 25,000,000	
	Total anggaran			Rp 55,000,000	

KABID PEMADAM KEBAKARAN,



ARRY PURNAMA, S.I.P  
Pembina / IV a  
NIP197804262005011004

Koba, 21 Maret 2024

KASI PENCEGAHAN  
KEBAKARAN,



YASIR ARAFAT, S.S  
Penata / III c  
NIP198002022006041020



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa No. 02 Koba – Bangka Tengah  
Kode Pos. 33681 Email : satpolpp.bateng@gmail.com

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Roy Haris Oktabian, S.STP, M.Si**

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Era Susanto, SH**

Jabatan : Plt. Bupati Bangka Tengah

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, 14 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



**Era Susanto, SH**

**Dr. Roy Haris Oktabian, S.STP, M.Si**  
Pembina Tk.I/ IV b  
NIP198210022002121002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
(ESELON II)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat yang Kondusif	Tingkat penyelesaian PelanggaranK3 (Ketertiban, Kententraman dan Keindahan)	100%
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%
2	Terwujudnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai Sakip OPD	BB (71.10)

Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp 6,099,194,000	APBD-P
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan ketertiban Umum	Rp 4,985,456,000	APBD-P
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Danpenyelamatan Non Kebakaran	Rp 938,868,000	APBD-P
Total anggaran		Rp 12,023,518,000	

Koba, 14 Oktober 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

Plt. BUPATI BANGKA TENGAH,



ERA SUSANTO, SH

Dr. ROY HARIS OKTABIAN, S.STP, M.Si  
Pembina Tk.I/ IV b  
NIP198210022002121002





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa No. 02 Koba – Bangka Tengah  
Kode Pos. 33681 Email : satpolpp.bateng@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN s**  
**TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Sirajuddin, S.AP**  
Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dr. Roy Haris Oktabian, S.STP, M.Si**  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Koba, 14 Oktober 2024**

**Pihak Kedua,**

**Dr. Roy Haris Oktabian, S.STP, M.Si**  
Pembina Tk.I/ IV b  
NIP198210022002121002

**Pihak Pertama,**

**Sirajuddin, S.AP**  
Pembina Tk.I/ IV b  
NIP197904282002121006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
(ESELON III a / SEKRETARIS )

No.	Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan OPD	Nilai Mutu Kepuasan Pelayanan	89
			Kinerja Laporan Keuangan	Sesuai SAP

Program		Anggaran		Keterangan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp	6,099,194,000	APBD-P
	Total anggaran	Rp	6,099,194,000	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Dr. ROY HARIS OKTABIAN, S.STP, M.Si  
Pembina Tk.I/ IV b  
NIP198210022002121002

Koba, 14 Oktober 2024

SEKRETARIS,



SIRAJUDDIN, S.AP  
Pembina Tk.I/ IV b  
NIP197904282002121006



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa No. 02 Koba – Bangka Tengah  
Kode Pos. 33681 Email : satpolpp.bateng@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Primadoni, SE**  
Jabatan : Kepala Bidang Ketertiban umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dr. Roy Haris Oktabian, S.STP, M.Si**  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Koba, 14 Oktober 2024**

**Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama,**

**Dr. Roy Haris Oktabian, S.STP, M.Si**  
**Pembina Tk.I/ IV b**  
**NIP198210022002121002**

**Primadoni, SE**  
**Pembina/ IV a**  
**NIP197804022006041003**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
( ESELON III b / KABID KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT )

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Pogram	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan K3 (Ketertiban, Kententrman dan Keindahan) yang dapat diselesaikan	100%
Program		Anggaran	Keterangan
II	Program Peningkatan Ketenteraman Dan ketertiban Umum	Rp 225,000,000	APBD-P
Total anggaran		Rp 225,000,000	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,



Dr. ROY HARIS OKTABIAN, S.STP, M.Si  
Pembina Tk.I/ IV b  
NIP198210022002121002

Koba, 14 Oktober 2024

KABID KETERTIBAN UMUM,  
KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT,



PRIMADONI, SE  
Pembina / IV a  
NIP197804022006041003



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa No. 02 Koba – Bangka Tengah  
Kode Pos. 33681 Email : satpolpp.bateng@gmail.com

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Sama Anam, S.Mn**

Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dr. Roy Haris Oktabian, S.STP, M.Si**

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Koba, 14 Oktober 2024**

**Pihak Kedua,**

**Dr. Roy Haris Oktabian, S.STP, M.Si**  
Pembina Tk.I/ IV b  
NIP198210022002121002

**Pihak Pertama,**

**Sama Anam, S.Mn**  
Penata Tk.I/ III d  
NIP198308132005011004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
( ESELON III b / KABID PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH )

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang di dilaksanakan sesuai Aturan	100%	
Program			Anggaran	Keterangan
II	Program Peningkatan Ketenteraman Dan ketertiban Umum		Rp 4,760,456,000	APBD-P
	Total anggaran		Rp 4,760,456,000	

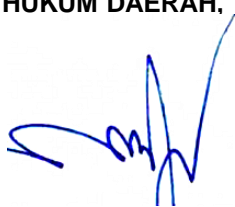
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,



Dr. ROY HARIS OKTABIAN, S.STP, M.Si  
Pembina Tk.I/ IV b  
NIP198210022002121002

Koba, 14 Oktober 2024

KABID PENEGAKAN PRODUK  
HUKUM DAERAH,



SAMA ANAM, S.Mn  
Penata Tk.I/ III d  
NIP198308132005011004



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa No. 02 Koba – Bangka Tengah  
Kode Pos. 33681 Email : satpolpp.bateng@gmail.com

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Arry Purnama, S.IP**  
Jabatan : Kepala Bidang Pemadam Kebakaran  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dr. Roy Haris Oktabian, S.STP, M.Si**  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, 14 Oktober 2024

Pihak Kedua,

**Dr. Roy Haris Oktabian, S.STP, M.Si**  
Pembina Tk.I/ IV b  
NIP198210022002121002

Pihak Pertama,

**Arry Purnama, S.IP**  
Pembina / IV a  
NIP197804262005011004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
( ESELON III b / KABID PEMADAM KEBAKARAN )

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran sesuai Waktu Tanggap (Respon Time Rate) pada daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%
Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Danpenyelamatan Non Kebakaran	Rp 938,868,000	APBD-P
Total anggaran		Rp 938,868,000	

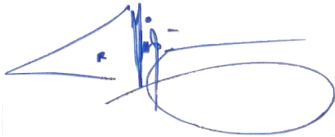
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,



Dr. ROY HARIS OKTABIAN, S.STP, M.Si  
Pembina Tk.I/ IV b  
NIP198210022002121002

Koba, 14 Oktober 2024

KABID PEMADAM KEBAKARAN,



ARRY PURNAMA, S.I.P  
Pembina / IV a  
NIP197804262005011004





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa No. 02 Koba – Bangka Tengah  
Kode Pos. 33681 Email : satpolpp.bateng@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Noviani, S.AP**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Sirajuddin, S.AP**

Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Koba, 14 Oktober 2024**

**Pihak Kedua,**

**Sirajuddin, S.AP**  
Pembina Tk.I/ IV b  
NIP197904282002121006

**Pihak Pertama,**

**Noviani, S.AP**  
Penata / III c  
NIP198811292011012003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
(ESELON IV a / KASUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN )

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Kelancaran administrasi Keuangan	Persentase Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP	100	Persen
2	Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100	Persen
3	Kelancaran Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen
4	Kelancaran administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100	Persen
5	Kelancaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100	Persen
6	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen
Kegiatan			Anggaran	Keterangan
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp 5,064,728,000	APBD-P
2	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Rp 10,000,000	APBD-P
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp 25,000,000	APBD-P
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp 149,200,000	APBD-P
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 227,004,000	APBD-P
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 603,262,000	APBD-P
	Total anggaran		Rp 6,079,194,000	

Koba, 14 Oktober 2024

SEKRETARIS,



SIRAJUDDIN, S.AP  
Pembina Tk.I/ IV b  
NIP197904282002121006

KASUBBAG UMUM,  
KEPEGAWAIAN DAN  
KEUANGAN,



NOVIANI, S. AP  
Penata / III c  
NIP198811292011012003



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa No. 02 Koba – Bangka Tengah  
Kode Pos. 33681 Email : satpolpp.bateng@gmail.com

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Kustina, A.Md**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Sirajuddin, S.AP**

Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, 14 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Sirajuddin, S.AP  
Pembina Tk.I/ IV b  
NIP197904282002121006

Pihak Pertama,

Kustina, A.Md  
Penata / III c  
NIP197301302006042006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
(ESELON IV a / KASUBBAG PERENCANAAN )

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Ketepatan Waktu dalam penyampaian laporan/dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan
Kegiatan			Anggaran	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp 20,000,000	APBD-P
	Total anggaran		Rp 20,000,000	

SEKRETARIS SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA.



SIRAJUDDIN, S.AP  
Pembina Tk.I/ IV b  
NIP197904282002121006

Koba, 14 Oktober 2024

KASUBBAG PERENCANAAN,



KUSTINA, A.Md  
Penata / III c  
NIP197301302006042006



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa No. 02 Koba – Bangka Tengah  
Kode Pos. 33681 Email : satpolpp.bateng@gmail.com

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Muji Santoso, S.IP**

Jabatan : Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Prasarana

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Primadoni, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Ketertiban umum, Ketentraman Masyarakat  
dan Perlindungan Masyarakat

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Koba, 14 Oktober 2024**

**Pihak Kedua,**

**Primadoni, SE**  
Pembina/ IV a  
NIP197804022006041003

**Pihak Pertama,**

**Muji Santoso, S.IP**  
Penata Tk. I / III d  
NIP198407122006041011

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
(ESELON IV a /KASI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN PRASARANA )

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	Persen
Kegiatan			Anggaran	Keterangan
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.		Rp 190,000,000	APBD-P
	Total anggaran		Rp 190,000,000	

KABID KETERTIBAN UMUM,  
KETENTRAMAN MASYARAKAT  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT,



PRIMADONI, SE  
Pembina / IV a  
NIP197804022006041003

Koba, 14 Oktober 2024

KASI OPERASI DAN  
PENGENDALIAN PRASARANA,



MUJI SANTOSO, S.IP  
Penata Tk. I / III d  
NIP198407122006041011



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa No. 02 Koba – Bangka Tengah  
Kode Pos. 33681 Email : satpolpp.bateng@gmail.com

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Ericson Ricardo, A.Md**  
Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Primadoni, SE**  
Jabatan : Kepala Bidang Ketertiban umum, Ketentraman Masyarakat  
dan Perlindungan Masyarakat

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Koba, 14 Oktober 2024**

**Pihak Kedua,**

**Primadoni, SE**  
Pembina/ IV a  
NIP197804022006041003

**Pihak Pertama,**

**Ericson Ricardo, A.Md**  
Penata Muda TK. I / III b  
NIP198203262005011004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
(ESELON IV a / KASI PERLINDUNGAN MASYARAKAT )

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya Mutu SDM Anggota Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Anggota Perlindungan Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan	100	Persen
Kegiatan			Anggaran	Keterangan
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp 35,000,000	APBD-P
			Rp 35,000,000	

KABID KETERTIBAN UMUM,  
KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT,



PRIMADONI, SE  
Pembina / IV a  
NIP197804022006041003

Koba, 14 Oktober 2024

KASI PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT,



ERICSON RICARDO, A.Md  
Penata Muda TK. I / III b  
NIP198203262005011004





# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa No. 02 Koba – Bangka Tengah  
Kode Pos. 33681 Email : satpolpp.bateng@gmail.com

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Efa Nurpajriyanti, SH**  
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan Dan Pengawasan  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Sama Anam, S.Mn**  
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah  
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Koba, 14 Oktober 2024**

**Pihak Kedua,**

**Sama Anam, S.Mn**  
Penata Tk.I / III d  
NIP198308132005011004

**Pihak Pertama,**

**Efa Nurpajriyanti, SH**  
Penata Tk. I / III d  
NIP198112072010012007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

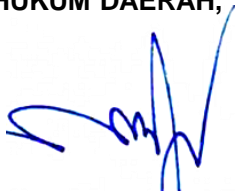
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
(ESELON IV a /KASI PEMBINAAN, PENYULUHAN DAN PENGAWASAN )

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
(2)	(1)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12	Laporan
		Jumlah anggota SATPOLP PP yang tersedia sebagai Tenaga Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	154	Orang

Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp 4,710,456,000	APBD-P
Total anggaran		Rp 4,710,456,000	

Koba, 14 Oktober 2024

KABID PENEGAKAN  
HUKUM DAERAH,



SAMA ANAM, S.Mn  
Penata Tk.I / III d  
NIP198308132005011004

KASI PEMBINAAN  
PENYULUHAN DAN  
PENGAWASAN,



EFA NURPAJRIYANTI, SH  
Penata Tk. I / III d  
NIP198112072010012007



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa No. 02 Koba – Bangka Tengah  
Kode Pos. 33681 Email : satpolpp.bateng@gmail.com

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Sapril, S.IP**  
Jabatan : Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Sama Anam, S.Mn**  
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah  
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Koba, 14 Oktober 2024**

**Pihak Kedua,**

**Sama Anam, S.Mn**  
Penata Tk.I / III d  
NIP198308132005011004

**Pihak Pertama,**

**Sapril, S.IP**  
Penata / III c  
NIP197809102004011018

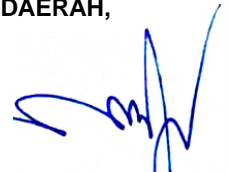
LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
(ESELON IV a /KASI KASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN )

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya penindakan yustisi dan Penyelidikan pelanggaran PERDA/ PERKADA serta Kebijakan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12	Laporan
2	Meningkatnya Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	6	Laporan

Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp 25,000,000	APBD-P
2	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rp 25,000,000	APBD-P
Total anggaran		Rp 50,000,000	

KABID PENEGAKAN PRODUK HUKUM  
DAERAH,



SAMA ANAM, S.Mn  
Penata Tk.I/ III d  
NIP198308132005011004

Koba, 14 Oktober 2024

KASI PENYELIDIKAN DAN  
PENYIDIKAN,



SAPRIL, S.I.P  
Penata / III c  
NIP197809102004041018



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa No. 02 Koba – Bangka Tengah  
Kode Pos. 33681 Email : satpolpp.bateng@gmail.com

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Imran, S.IP**

Jabatan : Kepala Seksi Operasi dan Penyelamatan Kebakaran

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Arry Purnama, S.IP**

Jabatan : Kepala Bidang Pemadam Kebakaran

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, 14 Oktober 2024

Pihak Kedua,

**Arry Purnama, S.IP**  
Pembina / IV a  
NIP197804262005011004

Pihak Pertama,

**Imran, S.IP**  
Penata / III c  
NIP197908162006041008

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
( ESELON IV a / KASI OPERASI DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN )

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kab/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota	100%	
Kegiatan			Anggaran	Keterangan
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp 893,868,000	APBD-P
	Total anggaran		Rp 893,868,000	

KABID PEMADAM KEBAKARAN,

ARRY PURNAMA, S.I.P  
Pembina / IV a  
NIP197804262005011004

Koba, 14 Oktober 2024

KASI OPERASI DAN  
PENYELAMATAN KEBAKARAN,

IMRAN, S.I.P  
Penata / III c  
NIP197908162006041008



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa No. 02 Koba – Bangka Tengah  
Kode Pos. 33681 Email : satpolpp.bateng@gmail.com

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Yasir Arafat, S.S**  
Jabatan : Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Arry Purnama, S.IP**  
Jabatan : Kepala Bidang Pemadam Kebakaran  
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Koba, 14 Oktober 2024**

**Pihak Kedua,**

**Arry Purnama, S.IP**  
Pembina / IV a  
NIP197804262005011004

**Pihak Pertama,**

**Yasir Arafat, S.S**  
Penata / III c  
NIP198002022006041020

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
(ESELON IV a / KASI PENCEGAHAN KEBAKARAN )

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya Pengendalian terhadap pencegahan kejadian Kebakaran	Persentase Pengendalian terhadap pencegahan kejadian Kebakaran	100	Persen
Kegiatan			Anggaran	Keterangan
1	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Rp 15,000,000	APBD-P
2	Investigasi Kejadian Kebakaran		Rp 5,000,000	APBD-P
3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Rp 25,000,000	APBD-P
	Total anggaran		Rp 45,000,000	

Koba, 14 Oktober 2024

KABID PEMADAM KEBAKARAN,

ARRY PURNAMA, S.I.P  
Pembina / IV a  
NIP197804262005011004

KASI PENCEGAHAN  
KEBAKARAN,

YASIR ARAFAT, S.S  
Penata / III c  
NIP198002022006041020





# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa No. 02 Koba – Bangka Tengah Kode Pos. 33681  
Telepon (0718) 7362 033 Email : satpolpp.bateng@gmail.com

### KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA NOMOR : 188.01/01/SATPOL PP/2024

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2024

#### KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKA TENGAH

Menimbang : a.bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

b.bahwa agar Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan dengan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 239);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 269);
11. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 155 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2024**

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah :

1. Menghimpun data sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Mengelola dan menyusun data tersebut dalam bentuk buku Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024.
3. Menyampaikan hasil penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 14 Januari 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba  
Pada tanggal 14 Januari 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH**



**Dr. Roy Haris Oktabian, S.STP, M.Si**  
**Pembina Tk.I/ IV b**  
**NIP198210022002121002**

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2024**

- Ketua : **KASAT POL PP KABUPATEN BANGKA TENGAH**
- Sekretaris : SEKRETARIS POL PP
- Anggota : 1. KEPALA BIDANG KETETIBAN UMUM, KETENTRAMAN  
MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
2. KEPALA BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH  
3. KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN  
4. KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN  
KEUANGAN  
5. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

Ditetapkan di Koba  
Pada tanggal 14 Januari 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH**



**Dr. Roy Haris Oktabian, S.STP, M.Si**  
**Pembina Tk.I/ IV b**  
**NIP198210022002121002**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**TAHUN ANGGARAN : 2024**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	( 3 )	(4 )
1	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Tingkat penyelesaian K3 (Ketertiban, Kententraman dan Keindahan)	100%
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%
2	Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Rate Time) wilayah Kebakaran	100%
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai Mutu Kepuasan masyarakat	89
		Nilai SAKIP OPD	BB
		Kinerja Laporan Keuangan	SESUAI

Koba, 03 Januari 2024  
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**



**Dr. Roy Haris Oktabian, S.STP, M.Si**  
**Pembina Tk.I/ IV b**  
**NIP198210022002121002**

## Rencana Inovasi Tahun 2024

A. Inovasi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang telah dilakukan dan masih berjalan sampai dengan tahun dilaksanakan pelaporan penyenggaraan pemerintahan daerah.

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
1.	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPAS (Sidak dan Pengawasan Anak Sekolah)	Sidak yang dilakukan untuk menangani kenakalan pelajar. Seperti siswa bolos atau berkeliaran pada jam pelajaran.
2.	Satuan Polisi Pamong Praja	SIPELIPUR (Prosesi Pemakaman Aparatur)	Berupa Upacara Prosesi Pemakaman bagi ASN yang meninggal dunia sebagai Bentuk Penghormatan dan Pelepasan bagi ASN tersebut.
3.	Satuan Polisi Pamong Praja	PATROLI MAGUMIS (Patroli Malam Minggu dan Kamis)	Patroli yang dilakukan setiap malam minggu dan malam kamis yang dimaksud untuk mengurangi tingkat kenakalan remaja juga mengurangi tingkat predaran minuman beralkohol ditengah masyarakat.
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	SI PENDEKAR BIRU (Sistem Informasi Penanganan Pemadaman Kebakaran Bangunan Induk dan Rumah)	Sistem yang bisa diakses untuk mengetahui titik Koordinat Kebakaran yang akurat sehingga mudah terdeteksi oleh Pos Damkar terdekat

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH**



**Dr. Roy Haris Oktabian, S.STP, M.Si**  
**Pembina Tk.I/ IV b**  
**NIP198210022002121002**



REWARD AND PUNISHMENT Satpol PP

PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada :

Rita Indra

Sebagai Anggota Linmas Terbaik di Lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah

Semoga Penghargaan ini dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan prestasi anda dan memotivasi rekan kerja agar terus berprestasi pada masa yang akan datang.



Algafry Rahman, ST  
Bupati Bangka Tengah





Drs. IRWAN, M.Tr.IP  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada :

Edi Oktono, St

Sebagai Anggota Damkar Terbaik di Lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah

Semoga Penghargaan ini dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan prestasi anda dan memotivasi rekan kerja agar terus berprestasi pada masa yang akan datang.



Algafry Rahman, ST  
Bupati Bangka Tengah





Drs. IRWAN, M.Tr.IP  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada :

Indra Sutiawan, S.IP

Sebagai Anggota Satpol PP Terbaik di Lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah

Semoga Penghargaan ini dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan prestasi anda dan memotivasi rekan kerja agar terus berprestasi pada masa yang akan datang.



Algafry Rahman, ST  
Bupati Bangka Tengah





Drs. IRWAN, M.Tr.IP  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada :

Suryadi, S.Pd

Sebagai Staf Terbaik di Lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah

Semoga Penghargaan ini dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan prestasi anda dan memotivasi rekan kerja agar terus berprestasi pada masa yang akan datang.



Algafry Rahman, ST  
Bupati Bangka Tengah





Drs. IRWAN, M.Tr.IP  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



## Dokumentasi Penyerahan Piagam Oleh Bupati yang didampingi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bangka Tengah





